



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

ANALISIS EFEKTIVITAS ALOKASI ANGGARAN PENDIDIKAN DASAR DI PROVINSI SUMATERA BARAT

SKRIPSI



SONYA DWI NATA
08 105 120 51

FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG 2012

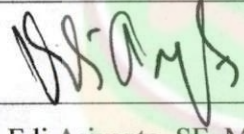
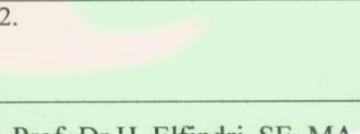
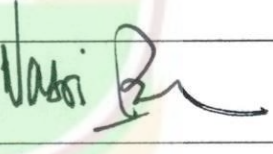
	No. Alumni Universitas	SONYA DWINATA	No. Alumni Fakultas
	BIODATA Tempat/tanggal lahir : Padang Panjang / 13 Maret 1990 b) Nama Orang Tua : Azwir & Suwarni c) Fakultas : Ekonomi d) Jurusan : Ilmu Ekonomi e) No. BP : 0810512051 f) Tanggal Lulus : 9 Januari 2012 g) Predikat Lulus : Dengan Pujian h) IPK : 3,68 i) Lama Studi : 3 tahun 5 bulan h) Alamat Orang Tua : Jl. Kartini No. 44 RT 02 Kel Tanah Hitam, Padang Panjang, Kec Padang Panjang Barat – Sumatera Barat .		

Analisis Efektivitas Alokasi Anggaran Pendidikan Dasar Provinsi Sumatera Barat
 Skripsi S1 oleh: Sonya Dwinata Pembimbing Skripsi: Edi Ariyanto, SE, M.Si

ABSTRAK

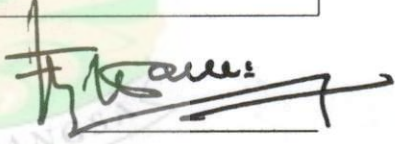
Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas alokasi anggaran pendidikan dasar dan pengaruhnya terhadap mutu pendidikan sekolah dasar 19 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat selama periode 2007 – 2011. Adapun variabel-variabel yang diamati rasio jumlah siswa putus sekolah, alokasi APBD untuk pendidikan dasar, jumlah BOS, dan jumlah anggaran rumah tangga . Jumlah siswa putus sekolah ditandai dengan perbandingan antara jumlah siswa yang mengalami putus sekolah pada tahun tersebut dibandingkan dengan jumlah siswa pendidikan dasar tahun tersebut pada 19 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat. Hasil analisis menyimpulkan bahwa alokasi APBD untuk pendidikan dasar berpengaruh positif dan signifikan secara statistik terhadap jumlah siswa putus sekolah pada 19 kabupaten/kota di Propinsi Sumatera Barat. Selanjutnya untuk jumlah BOS dan alokasi rumah tangga berpengaruh negatif dan signifikan secara statistik terhadap rasio jumlah siswa putus sekolah jenjang pendidikan dasar pada 19 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat. Selama 10 tahun pelaksanaan otonomi daerah (diambil sample sebanyak 5 tahun) di Propinsi Sumatera Barat secara empirik dapat dibuktikan bahwa jumlah siswa putus sekolah jenjang pendidikan dasar dari 19 kabupaten/kota di Propinsi Sumatera Barat menurun tiap tahunnya.

Skripsi telah dipertahankan di depan sidang penguji dan dinyatakan lulus pada 9 Januari 2012 .
 Abstrak telah disetujui oleh :

Tanda Tangan	1. 	2. 	3. 
Nama Terang	Edi Ariyanto, SE, M.Si	Prof. Dr.H. Elfindri, SE, MA	Dr. Nasri Bachtiar, SE, MS

Mengetahui,
 Ketua Jurusan : **Prof. Dr. H. Firwan Tan, SE, M.Ec. DEA. Ing**

NIP. 130 812 952


 Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftar ke fakultas/universitas dan mendapat nomor alumnus :

Petugas Fakultas/Universitas	
No. Alumni Fakultas	Nama Tanda Tangan
No. Alumni Universitas	Nama Tanda Tangan

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Syukur Alhamdulillah, senantiasa penulis haturkan kehadiran Allah SWT, atas segala taufik, hidayah dan inayah-Nya yang telah membukakan hati dan pikiran serta memberikan kekuatan dan kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Tujuan penelitian skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Strata satu pada Fakultas Ekonomi, Program Studi Ilmu Ekonomi Universitas Andalas Padang.

Penulis sepenuhnya menyadari bahwa selama proses penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak, baik secara moril maupun materil. Oleh karena itu tiada yang pantas penulis haturkan selain ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Edi Ariyanto, SE, M.Si selaku dosen pembimbing yang telah banyak meluangkan waktunya guna memberikan bimbingan, pengarahan, dan saran-saran kepada penulis sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Syafruddin Karimi, SE, MA, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.
3. Bapak Prof. Dr. H. Firwan Tan, SE, M.Ec. DEA. Ing, selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi Universitas Andalas.
4. Bapak Febriandi Prima Putra, SE, M.Si, selaku Kepala Program Studi Jurusan Ilmu Ekonomi Universitas Andalas.

5. Bapak Prof. Dr.H. Elfindri, SE, MA dan Bapak Dr. Nasri Bachtiar, SE, MS selaku Dosen penguji skripsi penulis.
6. Bapak Prof. Fashbir Noor Sidin, SE, MSP, Ph.D. selaku dosen pembimbing akademik penulis.
7. Bapak dan Ibu staf pengajar, serta Staf Biro dan Ruang baca Jurusan Ilmu Ekonomi, Uni Nel, Ibu Syam, Ibu Nini, serta staf lainnya yang telah memberikan kemudahan selama penulis belajar dan menyelesaikan skripsi ini.
8. Ayahanda Azwir dan Ibunda Suwarni, yang selalu mendo'akan penulis, pelita hidup yang tidak pernah padam, tauladan hidup terhebat, atas segala pengertian, dan ladang kasih sayang serta cinta yang sangat besar. Sungguh karunia terbesar bagi penulis telah menjadi bagian hidup dari papa dan mama.
9. Om, Tante, sepupu Bayu dan Bona "atun", serta My Brother yang jauh disana, yang sangat penulis sayangi dimana selalu membantu dan membangkitkan semangat penulis dalam menyelesaikan skripsi, pengalaman hidup ini akan lebih mendewasakan kita.
10. Franky Febriandi, banyak cinta untukmu atas kesabaran, cinta, kasih sayang, dan dukungan, bantuan, waktu berbagi dan konflik kita yang mendewasakan.
11. Teman-teman IE 08, Santi "temok", Eel "bund", Mumuy "tatak", Gigie, Lisa, Rizka dan Lovy, Zuhri "uncit", Rudi "jangan bawel lagi", Indah, Titit, Eyi, Risna, Elsa, Rika, Suci, Ipat, Amhe, Amel, Rudini, Amaik, dan semua

teman angkatan 2008 (semangat buat menyusul teman – teman ^,^), Fandu dan Yulia “yang sama panik buat seminar”, bang Andre “yang selalu baik membantu”, dan IE 07, Bang Werry dkk, Bang Dayat, SE, Kak Ee, SE, Kak Aya, SE, Bang Adi, SE (seperjuangan waktu seminar kemaren), serta semua keluarga besar, senior dan junior di jurusan ilmu ekonomi, Terima kasih atas bantuan dan masukannya.

12. Teman-teman KKN Dian, Eyind, Novi, Liza, Amaik, Abay, Ocu, Rian, Ifnul, Nana, Yeni, Icel, Mami, Phira, Ririn, Dinal, Dicky, Ari, Dheri.
13. Semua pihak yang telah membantu baik selama penulis menjalani kuliah maupun saat menulis skripsi makasih atas segalanya.

Semua pihak yang tanpa sengaja belum tersebut disini, terimakasih atas segala bantuan yang telah diberikan, hanya do’a yang penulis haturkan, semoga Allah SWT memberikan balasan dan menjadi amal ibadah yang mulia, Amin. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kesalahan. Karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun guna perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini. Semoga karya sederhana ini dapat memberi sumbangan yang berarti bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

Padang, Maret 2012

Penulis

DAFTAR ISI

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

ABSTRAK

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI iv

DAFTAR TABEL viii

DAFTAR LAMPIRAN ix

DAFTAR GAMBAR x

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Pemilihan Judul 1

1.2 Perumusan Masalah 6

1.3 Tujuan Penulisan 7

1.4 Manfaat Penulisan 8

1.5 Ruang Lingkup penelitian 8

1.6 Sistematika Penulisan 9

BAB II KERANGKA TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kerangka Teori 10

2.1.1 Teori Investasi 10

2.1.1.1	Pendidikan Sebagai Investasi Sumber Daya	
	Manusia	10
2.1.2	Teori Anggaran	17
2.1.3	Efektivitas Pembiayaan Pendidikan	21
2.2	Hubungan Anggaran Pendidikan dengan Mutu Pendidikan	24
2.3	Pola Penganggaran Pendidikan di Indonesia dan Sumatera Barat ...	27
2.4	Konsep Anggaran Pendidikan	31
2.4.1	Pengertian Anggaran	31
2.4.2	Karakteristik Anggaran Pendidikan	33
2.4.3	Anggaran Pendidikan dalam Kacamata UUD 1945 dan UU Sisdiknas 2003	35
2.5	Desentralisasi Pendidikan	35
2.6	Tinjauan Pustaka	41
2.7	Hipotesis	41

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1	Data dan Sumber Data	42
3.2	Analisis Data	42
3.2.1	Analisis Kualitatif	42
3.2.2	Analisis Kuantitatif	43
3.3	Definisi Operasional	44
3.4	Uji Statistik	45
3.4.1	Koefisien Determinasi (R Square)	45

3.4.2	Uji F - Statistik (Uji Keseluruhan)	45
3.4.3	Uji t – Statistik	47

BAB IV GAMBARAN UMUM

4.1	Gambaran Umum Propinsi Sumatera Barat	49
4.2	Kondisi Pendidikan Dasar Sumatera Barat	50
4.2.1	Permasalahan Pendidikan	50
4.2.2	Masalah Mutu Pendidikan	52
4.2.3	Masalah Tata Kelola	55
4.3	Strategi Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Pendidikan Dasar	56
4.4	Penyelenggaraan Pendidikan di Sumatera Barat dengan Indikator Siswa Putus Sekolah pada Jenjang Pendidikan Dasar	59

BAB V HASIL PEMBAHASAN DAN PENEMUAN EMPIRIS

5.1	Pengujian Empiris	61
5.1.1	Penemuan Empiris	62
5.1.2	Uji Hipotesa	62
5.1.3	Analisis Data	63
5.2	Implikasi dan Kebijaksanaan	64
5.2.1	Efisiensi Pembiayaan Pendidikan	64
5.2.2	Pengaruh Pembiayaan Terhadap Efektivitas	65

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan	67
6.2 Saran	69

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Luas Wilayah Kabupaten/Kota Propinsi Sumatera barat	49
Tabel 4.2.1	Partisipasi Siswa Jenjang Pendidikan Dasar	
	Provinsi Sumatera Barat	51
Tabel 4.2.2	Alokasi APBD Jenjang Pendidikan Dasar	54
Tabel 4.3	Anggaran Pendidikan dari rumah tangga	58
Tabel 4.4.1	Jumlah Siswa Putus Sekolah Sumatera Barat	59
Tabel 4.4.2.	Rasio Jumlah Siswa Putus Sekolah dengan Jumlah Siswa Jenjang Pendidikan Dasar Provinsi Sumatera Barat	60



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Partisipasi Siswa Jenjang Pendidikan Dasar Provinsi Sumatera Barat

Lampiran 2. Jumlah Siswa Putus Sekolah Provinsi Sumatera Barat Tahun

2006/2007 – 2010/2011

Lampiran 3. Rasio Jumlah Siswa Putus Sekolah dengan Jumlah Siswa Jenjang Pendidikan Dasar Provinsi Sumatera Barat

Lampiran 4. Distribusi APBD menurut Bidang Tahun Ajaran 2006/2007

hingga 2010/2011

Lampiran 5. Jumlah Beasiswa Bos Provinsi Sumatera Barat (dalam juta)

Lampiran 6. Jumlah Anggaran Rumah Tangga Provinsi Sumatera Barat

Lampiran 7. Regression



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Teori Alokasi Barang Publik	18
--	----



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Pemilihan Judul

Pendidikan merupakan salah satu aspek dalam masyarakat yang berperan penting dalam meningkatkan kualitas hidup suatu bangsa. Semakin tinggi tingkat pendidikan maka semakin baik pula kualitas sumber daya manusianya. Pendidikan nasional berdasarkan Pancasila bertujuan untuk meningkatkan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kecerdasan dan keterampilan, mempertinggi budi pekerti, memperkuat kepribadian dan mempertebal semangat kebangsaan dan cinta tanah air. Titik berat pembangunan pendidikan diletakkan pada peningkatan mutu dan perluasan pendidikan dasar dalam rangka mewujudkan dan memantapkan pelaksanaan wajib belajar (BPS Sumbar, 2008). Sumber daya manusia yang berpendidikan akan menjadi modal utama pembangunan nasional, terutama untuk perkembangan ekonomi. Semakin banyak orang yang berpendidikan maka semakin mudah bagi suatu negara untuk membangun bangsanya. Hal tersebut tidak terlepas dari anggaran atau pendanaan untuk sektor pendidikan, baik itu dari pemerintah pusat maupun dari pemerintah daerah.

Walaupun pembangunan bidang pendidikan telah dilaksanakan secara intensif selama lebih 30 tahun, mutu pendidikan nasional Indonesia umumnya dan Sumatera Barat khususnya masih terbilang rendah. Permasalahan yang ada disini berkaitan dengan alokasi anggaran untuk sektor pendidikan yang belum efektif sesuai tujuan yang ingin dicapai.

Anggaran pendidikan nasional seharusnya diprioritaskan untuk mengentaskan pendidikan dasar 9 tahun dan bila perlu diperluas menjadi 12 tahun. Apabila semua anak usia pendidikan dasar sudah terlayani mendapatkan pendidikan tanpa dipungut biaya, barulah anggaran pendidikan dialokasikan untuk pendidikan tingkat selanjutnya. Studi yang dilakukan oleh Clark et al (1998) menunjukkan bahwa sebagian besar dana pendidikan di sekolah negeri dialokasikan bagi pengembangan sistem, administrasi dan tenaga pengajar. Sementara itu, dana yang dialokasikan untuk kegiatan operasional dan pemeliharaan masih sangat terbatas, terutama pada tingkat pendidikan yang lebih rendah (Elfindri, dkk, 2004).

Dewasa ini permintaan akan pendidikan sejalan dengan semakin dibutuhkannya pendidikan formal didalam dunia kerja. Hal ini akan berpengaruh langsung terhadap anggaran pendidikan, di dalam penyediaan sarana dan prasarana pendidikan seperti gedung maupun tenaga pengajar, tenaga administrasi dan buku buku pelajaran oleh pemerintah. Besarnya anggaran pendidikan menjadi salah satu pembicaraan utama dari beberapa pihak, diantaranya dipersoalkan apakah pemerintah benar – benar menempatkan investasi sumber daya manusia pada prioritas teratas. Namun demikian yang mengkhawatirkan apakah kenaikan anggaran pendidikan akan melahirkan akses yang tidak diingini terutama dilihat dari efektivitas penggunaan dana.

Pada masa setelah reformasi, pendidikan sudah memasuki era desentralisasi pendidikan yang merupakan sebuah keharusan, namun realitasnya, pelaksanaan desentralisasi pendidikan terkesan suatu tindakan yang agak tergesa –

gesa dan tidak siap. Hal ini biasa dilihat dari belum memadainya sumber daya manusia (SDM) daerah, sarana dan prasarana yang kurang memadai, manajemen pendidikan yang belum optimal, disamping itu juga sekian banyak permasalahan yang masih dihadapi dunia pendidikan di daerah. Dalam masa ini, pemerintah berupaya untuk mencapai pengalokasian anggaran pendidikan dari APBD mencapai 20%.

Perumusan program pembangunan pada akhirnya berimplikasi pada besarnya anggaran yang harus disediakan pemerintah. Selama ini alokasi dana menjadi alasan klasik dari lambatnya kemajuan pembangunan pendidikan nasional. Namun banyak pihak berpendapat bahwa alokasi anggaran seharusnya tidak selalu dijadikan alasan. Hal yang paling penting adalah perlu adanya ketegasan dan kemauan kuat dari aparat pemerintah untuk melaksanakan berbagai keputusan politik di bidang pendidikan sebagaimana yang tercantum dalam UU dan peraturan perundangan lainnya. Selama pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pembangunan pendidikan bekerja asal asalan dan mekanisme pengawasan pelaksanaannya masih lemah, maka berapapun anggaran yang tersedia tidak menjamin keberhasilan dan keberlanjutan pembangunan pendidikan (Toyamah, 2004).

Khusus dalam pembangunan pendidikan dasar, peran dan tanggung jawab pemerintah masih sangat besar, antara lain terlihat dari banyaknya jumlah sekolah dasar, murid SD dan guru, terutama di sekolah sekolah negeri yang harus dibiayai pemerintah Nasional. Pada tahun fisikal 2009/2010 jumlah SD lengkap mencapai 143.252 buah, sebanyak 130.563 buah atau 92% diantaranya berstatus SD negeri.

Demikian pula jika dilihat dari jumlah murid berdasarkan status sekolah, pada tahun fisikal 2009/2010 sekitar 21 juta murid (92%) bersekolah di SD negeri. (Depdiknas,2010).

Persoalan pendidikan dasar seperti yang digambarkan diatas juga terjadi pada daerah daerah. Kemampuan dan tekad pemerintah daerah saat ini memegang sebagian besar kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan pendidikan dasar juga masih menghadapi banyak hambatan. SDM pengelola pendidikan dasar di banyak daerah dinilai belum sepenuhnya siap, kebanyakan dari mereka masih pada taraf pelaksana saja. Keadaan ini dipersulit dengan kesalahan pengalokasian anggaran sehingga untuk beberapa tahun ke depan pengelolaan dan pembangunan pendidikan dasar di Sumatera Barat diperkirakan belum akan mengalami perbaikan yang berarti.

Di Sumatera Barat itu sendiri, terjadi keterbatasan pemasukan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui eksploitasi Sumber Daya Alam (SDA) yang tersedia, namun komitmen terhadap eksistensi pendidikan bagi masa depan masyarakatnya menjadi sangat penting dan dibutuhkan. Oleh karena itu diperlukan berbagai kebijakan menyangkut pengembangan SDM dan kebijakan alokasi tepat dari anggaran pendidikan yang bersumber dana APBD Provinsi. Anggaran pendidikan yang disalurkan sebesar dari 3.11 % tahun 2005 menjadi 13.11 % tahun 2006. Tahun-tahun berikutnya anggaran pendidikan ini mengalami peningkatan, hal ini terlihat pada Tahun 2007 anggaran pendidikan yang direalisasikan sebesar 16,3% menjadi 19% pada tahun 2008. Dan terakhir pada tahun 2009 berdasarkan persetujuan DPRD Provinsi Sumatera Barat anggaran pembangunan sektor

pendidikan telah ditetapkan sebesar 20 %. (Dinas Pendidikan Sumatera Barat, 2009).

Namun meskipun terjadi peningkatan anggaran untuk pendidikan, mutu dan kualitas dari output pendidikan tersebut masih belum mencapai tujuan yang diharapkan. Terlihat dari realisasi anggaran yang 20% dari APBD ataupun APBN itu. Pada bahagian awal mobilitas kenaikan anggaran pendidikan yang bersumber dari APBD Provinsi Sumatera Barat, yakni tahun 2006 dan 2007 sebagian besar anggaran ini diarahkan untuk membiayai program kegiatan peningkatan dan pengembangan berbagai bentuk akses pendidikan guna memberikan peluang dan kesempatan untuk anak usia sekolah untuk dapat bersekolah, khususnya pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) satuan pendidikan SMP, SMA dan SMK. Kebijakan ini ditempuh mengingat anggaran dekonsentrasi untuk pembangunan USB sejak tahun 2005 tidak lagi tersedia. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir yang dimulai sejak tahun 2006 sampai 2010 jumlah lembaga persekolahan terus mengalami peningkatan. Namun meskipun terjadi peningkatan, efektivitas dari implementasi anggaran pendidikan belum mampu bersaing secara kompeten dengan dunia luar.

Menurut Psacaropulus (1992), dalam anggaran pendidikan ada hal yang perlu dikaji dan dianalisis yaitu biaya pendidikan secara keseluruhan (total cost) dan biaya per siswa (unit cost). Biaya satuan ini dianggap standar dan dapat dibandingkan antar sekolah yang satu dengan sekolah yang lain. Dengan menganalisis biaya satuan ini memungkinkan untuk mengetahui investasi dalam penggunaan dan pemerataan pengeluaran pemerintah, swasta, masyarakat, dan

orang tua untuk pendidikan dan lingkungan terus dikelola dan dibina secara optimal dengan memperoleh tingkat investasi yang tinggi.

Berdasarkan uraian diatas, penulis mencoba menganalisa sejauh mana implementasi anggaran pendidikan dasar di Provinsi Sumatera Barat di era otonomi, untuk itu penulis mengambil judul **“Analisis Efektivitas Alokasi Anggaran Pendidikan Dasar Di Provinsi Sumatera Barat”**.

1.2 Perumusan Masalah

Kebijakan pendidikan di Provinsi Sumatera Barat di fokuskan kepada dua hal yang utama yaitu tuntas wajib belajar sembilan (9) tahun dan peningkatan mutu pendidikan di segala jenjang pendidikan (SD-SLTP dan SLTA). Kebijakan ini diambil dikarenakan ada berbagai persoalan yang masih melingkupi bidang pendidikan di Provinsi Sumatera Barat antara lain masih rendahnya tingkat pemerataan pendidikan dasar dan menengah, masih rendahnya kualitas pendidikan dan belum mampu memenuhi kebutuhan kompensasi peserta didik, ketersediaan pendidik yang belum memadai secara kualitas maupun kuantitas, fasilitas belajar belum mencukupi dan biaya operasional pendidikan yang belum memadai, masih rendahnya kualifikasi pendidik memiliki pendidikan seperti yang disyaratkan, dan belum meratanya proporsi penyebaran tenaga pendidik,.

Untuk itu dengan melihat kondisi tersebut di Provinsi Sumatera Barat sangat menarik kiranya ditelaah lebih lanjut bagaimana kebijakan daerah di bidang pendidikan, yang dalam hal ini akan lebih difokuskan pada persoalan efektivitas alokasi anggaran pendidikan yang dinilai selama ini menjadi hal yang

cukup krusial untuk dibahas mengingat pendidikan sekarang ini menjadi tanggung jawab pemerintah Daerah (kabupaten sepenuhnya) setelah pelimpahan kewenangan yang begitu besar dari pemerintah pusat.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka dikemukakan perumusan masalah dari penelitian ini :

1. Bagaimana Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran pendidikan yang diambil 20% dari APBD Sumbar?
2. Bagaimana efektivitas alokasi kebijakan anggaran pendidikan studi di Provinsi Sumatera Barat dilihat dari aspek regulasi dan mekanisme penyusunan anggaran pendidikan?
3. Sejauh mana peningkatan anggaran atau alokasi anggaran mampu memperbaiki mutu lulusan siswa sekolah dasar di Sumatera Barat?

1.3 Tujuan Penulisan

Melihat dari rumusan masalah diatas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Menganalisis peningkatan anggaran atau alokasi anggaran pendidikan sekolah dasar di Sumatera Barat.
2. Mengevaluasi efektivitas alokasi anggaran pendidikan dan pengaruhnya terhadap mutu pendidikan sekolah dasar di Sumatera Barat.
3. Menganalisis dampak efektivitas alokasi anggaran pendidikan terhadap mutu pendidikan sekolah dasar di Sumatera Barat.

1.4 Manfaat Penulisan

Manfaat yang bisa diambil dalam penelitian ini adalah :

1. Sebagai bahan studi dan tambahan bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi terutama mahasiswa Departemen Ekonomi Pembangunan.
2. Sebagai masukan bagi kalangan akademis dan peneliti yang tertarik untuk membahas topik yang sama.
3. Sebagai bahan masukan bagi lembaga pendidikan untuk dapat meningkatkan implementasi anggaran pendidikan dasar secara efisien di era otonomi daerah saat sekarang ini.

1.5 Ruang Lingkup

Sesuai dengan judul penelitian ini memusatkan diri pada pengkajian mengenai efektivitas alokasi anggaran pendidikan dasar di Provinsi Sumatera Barat diukur dengan Jumlah siswa putus sekolah pada jenjang pendidikan dasar yang dipengaruhi oleh faktor distribusi/alokasi dana dari APBD menurut bidang , Jumlah Anggaran Beasiswa BOS (Bantuan Operasional Sekolah), dan Biaya Rumah Tangga.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas secara sistematis mengenai masalah yang akan dibahas, maka sistematika penulisan adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Merupakan bab pendahuluan yang terdiri atas: latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II KERANGKA TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini dikemukakan kajian teoritis yang menguraikan kerangka teori yang dapat mendukung penelitian ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini dikemukakan metodologi penelitian yang digunakan untuk mengolah dan menganalisis data.

BAB IV GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN

Merupakan bab yang menggunakan Gambaran tentang pendidikan dasar dan realisasi alokasi anggaran pendidikan dasar di Sumbar

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi semua temuan-temuan yang dihasilkan dalam penelitian dan analisa statistik

BAB VI PENUTUP

Bab ini akan menjelaskan kesimpulan dari analisa yang dilakukan dan implikasi yang muncul dari hasil simpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah sehingga dapat ditarik benang merah apa implikasi dari penelitian yang dilakukan.

BAB II

KERANGKA TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kerangka Teori

Dalam menganalisis efektivitas alokasi anggaran pendidikan dasar terhadap jumlah apbd, jumlah BOS, dan anggaran rumah tangga pada 19 kabupaten/kota di Propinsi Sumatera Barat, penelitian ini mendasarkan pada teori-teori yang relevan sehingga mendukung bagi tercapainya hasil penelitian yang ilmiah. Dasar teori yang digunakan sebagai landasan teori dalam penelitian ini adalah teori tentang investasi sumber daya manusia, teori anggaran, teori efektivitas pembiayaan pendidikan. Teori-teori ini yang akan dijadikan peneliti sebagai dasar pemikiran dan menjadi acuan dalam melakukan penelitian.

2.1.1 Teori Investasi

2.1.1.1 Pendidikan sebagai Investasi Sumber Daya Manusia

Pendidikan adalah salah satu investasi sumber daya manusia (SDM) yang penting. Untuk memperoleh pekerjaan yang layak dengan upah yang tinggi, seseorang membutuhkan keterampilan (skill) yang memadai. Keterampilan yang memadai dapat diperoleh melalui pendidikan. Pendidikan juga merupakan elemen penting dalam rangka memerangi kemiskinan, memberdayakan wanita, dan menyelamatkan anak-anak dari berbagai upaya eksploitasi (UNICEF). Selain itu, antara tingkat pendidikan dengan status kesehatan seseorang juga berhubungan positif (Education Statistic Bulletin, 1999). Gagasan bahwa investasi pendidikan memiliki manfaat ekonomi dan sosial jangka panjang bagi individu maupun

masyarakat luas sudah muncul pada masa Adam Smith bahkan sebelumnya (Center for the Study Living Standard, 2001).

SDM didefinisikan sebagai kumpulan investasi, antara lain melalui pendidikan, kesehatan, pelatihan kerja, dan migrasi yang mengembangkan produktivitas individu dalam pekerjaan dan juga pada kegiatan bukan pekerjaan (center for the study living standard, 2001). Dalam perkembangannya, definisi SDM makin diperluas, tidak hanya mencakup pendidikan dan kesehatan tetapi memasukkan juga factor mobilitas dan rasa aman . Dengan mobilitas, manusia mampu menemukan pekerjaan dan tempat tinggal yang lebih baik, sebaliknya rasa tidak aman dapat mengakibatkan kapasitas produktivitas seseorang menurun.

Pengetahuan dan pengalaman umum menunjukkan bahwa terdapat korelasi positif antara pendapatan dan tingkat pendidikan seseorang. Demikian pula tingkat pendidikan juga berpengaruh nyata pada pertumbuhan ekonomi suatu Negara. Namun, beberapa kajian terakhir menunjukkan bahwa pola hubungan antara tingkat pendidikan dengan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi suatu Negara ternyata bervariasi. Kajian yang dilakukan Pritchett (1999), misalnya menyebutkan bahwa pola hubungan antara pendidikan dengan output per pekerja berbeda antara satu Negara dengan Negara lainnya. Korelasinya ada yang positif, tetapi ada juga yang negative. Hal ini dipengaruhi oleh adanya perbedaan kualitas pendidikan dan kondisi perkembangan pasar tenaga kerja di suatu Negara. Lebih lanjut Pritchett mengemukakan tiga kemungkinan yang menyebabkan perbedaan tersebut, yaitu :

1. Perbedaan kualitas pendidikan antar Negara, system pengajaran di suatu Negara tidak menambah keterampilan seseorang
2. Pertumbuhan pasar tenaga kerja terdidik sangat bervariasi antar Negara, jika di suatu Negara pasar tenaga kerja terdidik tidak berkembang maka pekerja dengan pendidikan yang lebih tinggi akan bekerja di sector yang sebenarnya hanya memerlukan tenaga kerja dengan tingkat pendidikan yang lebih rendah
3. Kondisi institusional di suatu Negara yang buruk menyebabkan tenaga kerja terdidik bekerja di bidang yang kontra – produktif

Pendidikan dasar memberikan kecakapan yang diperlukan generasi muda sehingga mereka mampu menentukan pilihan yang rasional, hidup bertanggung jawab dan hidup sehat. Pengetahuan dapat meningkatkan nilai nilai kemanusiaan, menghargai perbedaan, dan memperbaiki dialog antar kultur. Jenjang pendidikan dasar merupakan investasi paling menguntungkan bagi pembangunan suatu Negara. Pendidikan dasar memberikan rate of return paling tinggi dibandingkan dengan jenjang pendidikan selanjutnya. Psacharopoulos dan Patrinos (2002) mengatakan bahwa return of education investment untuk tingkat pendidikan dasar, baik terhadap private benefit maupun social benefit menunjukkan rate of return paling tinggi. Makin tinggi tingkat pendidikan makin tinggi private benefitnya, namun seiring dengan makin tingginya tingkat pendidikan tersebut social benefitnya cenderung menurun.

Namun factor keberlanjutan (sustainability) dalam perbaikan system pendidikan kelihatannya sangat menentukan keberhasilan dalam mencapai tujuan

pendidikan. untuk mengukur keberhasilan investasi sumber daya manusia dapat dilihat dari pengetahuan umum, pengetahuan khusus, keterampilan, serta tingkat pendidikan masyarakat. Kuantitas sumber daya manusia akan ditentukan oleh sejumlah factor yang merupakan indikator masukan yang mencakup kualitas dan aksesstabilitas terhadap system pendidikan. Indikator masukan untuk pendidikan merupakan total sumber daya yang diberikan oleh pemerintah dan/atau masyarakat (Center for The Study of Living Standards, 2001). Dengan demikian adanya penyelenggaraan pendidikan yang bermutu dan memiliki relevansi yang jelas dengan kebutuhan masyarakat menjadi sesuatu yang sangat penting. Terbukanya akses pada jenjang pendidikan dasar khususnya menjadi hak azazi manusia yang sangat mendasar dan tidak dapat ditawar lagi.

Investasi sumber daya manusia dalam pendidikan ini dilatarbelakangi oleh lemahnya sumber daya manusia Indonesia dalam perkembangan pembangunan. Penyebabnya karena pemerintah selama ini tidak pernah menempatkan pendidikan sebagai prioritas terpenting. Tidak ditempatkannya pendidikan sebagai prioritas terpenting karena masyarakat Indonesia hanya berorientasi mengejar uang untuk memperkaya diri sendiri dan tidak pernah berpikir panjang.

Hovemon dan Wolve (1995) mengatakan bahwa investasi tergantung pada pilihan – pilhan orang tua, pendapatan rumah tangga dan fertilitas. Ada dua aspek yang menentukan keputusan orang tua untuk mengirim anaknya bersekolah. Pertama adalah aspek konsumsi, dimana orang tua memilih menyekolahkan anaknya tanpa memperhatikan manfaat financial dari pendidikan. Kedua adalah aspek investasi, yang mengemukakan bahwa pendidikan mungkin akan bernilai

tinggi karena akan menghasilkan tingkat pengembalian financial (atau yang lainnya) terhadap orang tua (The World Bank Review; 1992).

Sekarang, pemerintah Indonesia mulai melirik pendidikan sebagai investasi sumber daya manusia, setelah selama ini pendidikan terabaikan. Salah satu indikatornya adalah telah disetujuinya oleh MPR untuk memprioritaskan anggaran pendidikan minimal 20 % dari APBN atau APBD. Langkah ini merupakan awal kesadaran pentingnya pendidikan sebagai investasi sumber daya manusia. Nurkolis menginterpretasi sedikitnya terdapat tiga alasan untuk memprioritaskan pendidikan sebagai investasi sumber daya manusia.

Pertama, pendidikan adalah alat untuk perkembangan kemajuan individu. Misalnya pendidikan dapat membantu siswa untuk mendapatkan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk hidup dan berkompetisi dalam lapangan pekerjaan yang kompetitif.

Kedua, investasi pendidikan memberikan nilai balik (*rate of return*) yang lebih tinggi dari pada investasi fisik di bidang lain. Nilai balik pendidikan adalah perbandingan antara total biaya yang dikeluarkan untuk membiayai pendidikan dengan total pendapatan yang akan diperoleh setelah seseorang lulus dan memasuki dunia kerja.

Ketiga, investasi dalam bidang pendidikan memiliki banyak fungsi yaitu fungsi sosial-kemanusiaan, fungsi politis, fungsi budaya, fungsi teknis-ekonomis, dan fungsi kependidikan. Fungsi sosial-kemanusiaan merujuk pada kontribusi pendidikan terhadap perkembangan manusia dan hubungan sosial pada berbagai tingkat sosial yang berbeda. Misalnya pada tingkat individual pendidikan

membantu siswa untuk mengembangkan dirinya secara psikologis, sosial, fisik, dan membantu siswa mengembangkan potensinya semaksimal mungkin.

Pilihan investasi pendidikan juga harus mempertimbangkan tingkatan pendidikan. Di Asia nilai balik sosial pendidikan dasar (SD) rata-rata sebesar 27 %, pendidikan menengah (SMP dan SMA) 15 %, dan pendidikan tinggi (PT) 13 %. Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka manfaat sosialnya semakin kecil. Jelas sekali bahwa pendidikan dasar memberikan manfaat sosial yang paling besar di antara tingkat pendidikan lainnya. Hal ini mengindikasikan bahwa pendidikan dasar harus mendapat prioritas utama.

Upaya-upaya perbaikan dan peningkatan mutu pendidikan melalui perbaikan mutu proses pembelajaran di kelas (di ruang kelas, di laboratorium, dan di lapangan) merupakan inovasi pendidikan yang harus terus dilakukan. Salah satu inovasi adalah mengubah paradigma pembelajaran dari pembelajaran yang terpusat pada guru kepada pembelajaran yang terpusat pada siswa. Pendekatan pembelajaran yang berbasis mengajar (guru yang aktif) diubah ke dalam bentuk siswa membangun pengetahuan di dalam benaknya sendiri dari berbagai variasi informasi melalui suatu interaksi dalam proses pembelajaran.

Pengubahan paradigma pembelajaran dapat diawali dengan strategi keberwacanaan sebagai rujukan yang baik dan benar bagi siswa dalam memperoleh ilmu pengetahuannya. Strategi keberwacanaan ini sangat penting karena strategi keberwacanaan merupakan salah satu sarana yang signifikan dalam menunjang proses kegiatan pembelajaran. Strategi keberwacanaan yang dimaksud

adalah strategi yang berupaya meningkatkan kemampuan membaca dalam menunaikan tugas-tugas yang bertalian dengan dunia kerja dan kehidupan di luar sekolah. Keberwacanaan mengacu pada keterampilan membaca dan menulis secara efektif. Pengembangan keberwacanaan dapat dilaksanakan melalui pemanfaatan buku sebagai media pembelajaran membaca dan menulis.

Para penganut teori *human capital* berpendapat bahwa pendidikan adalah sebagai investasi sumber daya manusia yang memberi manfaat moneter ataupun nonmoneter. Manfaat nonmoneter dari pendidikan adalah diperolehnya kondisi kerja yang lebih baik, kepuasan kerja, efisiensi konsumsi, kepuasan menikmati masa pensiun dan manfaat hidup yang lebih lama karena peningkatan gizi dan kesehatan. Manfaat moneter adalah manfaat ekonomis yaitu berupa tambahan pendapatan seseorang yang telah menyelesaikan tingkat pendidikan tertentu dibandingkan dengan pendapatan lulusan pendidikan di bawahnya. (Walter W. McMahon dan Terry G. Geske, 1982).

Singkatnya pendidikan adalah sebagai investasi jangka panjang yang harus menjadi pilihan utama. Pendidikan di Indonesia terkendala karena kebiasaan membaca masyarakat di negeri ini belum memuaskan. Minimnya kebiasaan membaca membuat sulit mengharap anak bangsa dapat cerdas mengakses informasi menggunakan teknologi informasi. Dalam jangka panjang, situasi ini menciptakan problem lebih serius. Problem yang akan dihadapi generasi mendatang tidak akan dapat meningkatkan skill dan kemampuan mereka menjadi *knowledge worker* atau pekerja berpengetahuan. Akhirnya, bangsa ini akan gagal dalam meraih keunggulan daya saing dibandingkan dengan bangsa-bangsa lain.

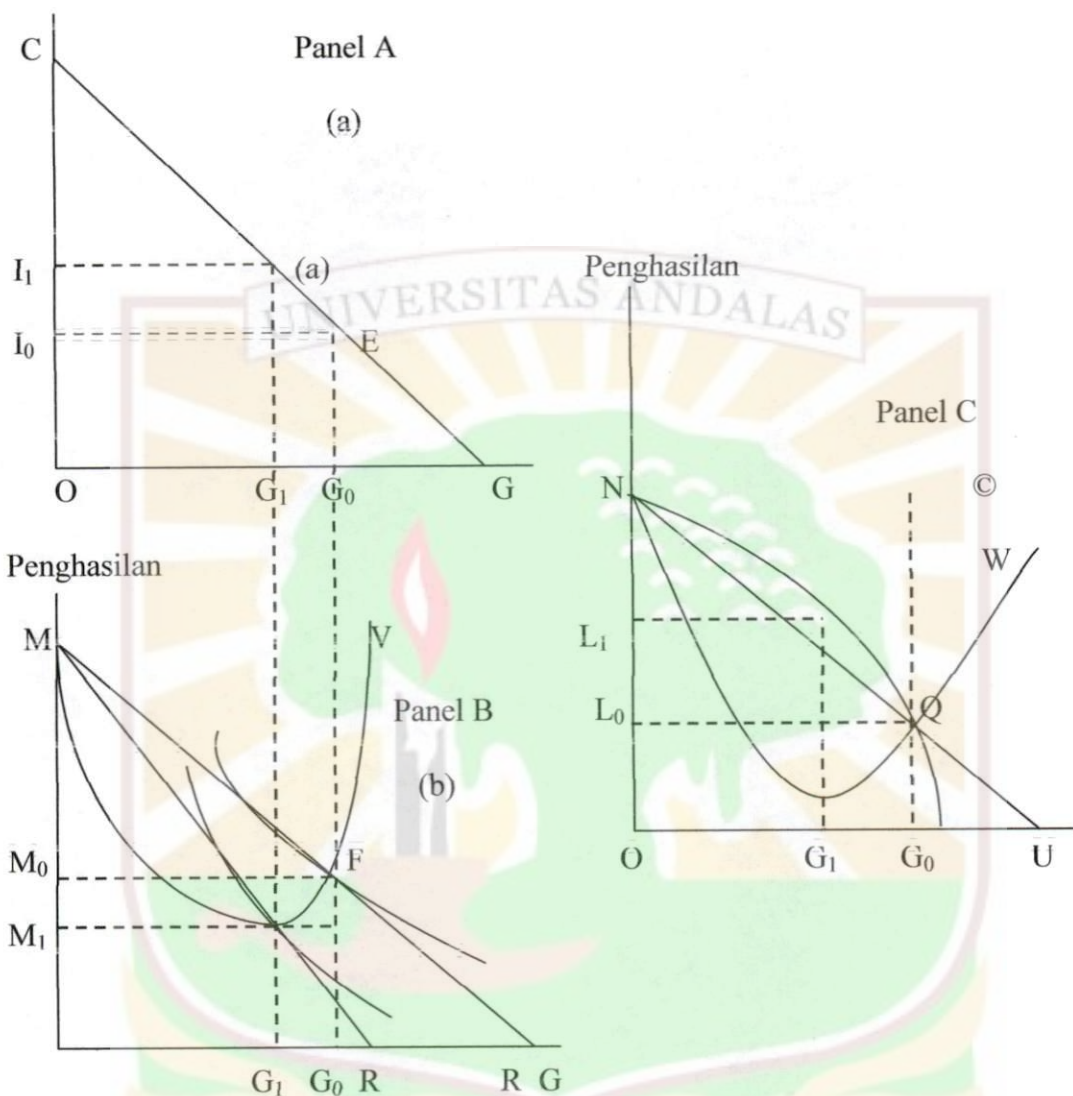
Digital divide atau terjadinya jurang informasi akan melanda bangsa kita. Berhadapan dengan bangsa yang lebih maju akan semakin membuat bangsa ini terpuruk, ketinggalan dengan bangsa-bangsa tersebut. Agar tidak menjadi pecundang di era reformasi, sudah selayaknya institusi pendidikan mengambil peran aktif untuk mengaktualisasikan sebuah visi membangun masyarakat membaca. Hanya dengan usaha inilah, sebutnya, kita akan dapat membangun literasi yang lain seperti literasi ilmu pengetahuan, literasi ekonomi, literasi teknologi, literasi multikultural dan literasi lain yang dapat digunakan untuk membuat dunia menjadi lebih baik dan meningkatkan kualitas hidup manusia.

2.1.2 Teori Anggaran

Pendidikan maupun pelayanan pendidikan merupakan suatu barang public. Salah satu teori yang menerangkan penyediaan barang barang public adalah teori alokasi barang – barang public melalui anggaran (budget). Teori ini didasarkan pada suatu analisa dimana setiap orang membayar atas penggunaan barang – barang public dengan jumlah yang sama, yaitu sesuai dengan system harga untuk barang – barang swasta (private goods) (Guritno, 1995).

Teori alokasi barang barang public melalui budget dijelaskan dengan gambar 2.1

Penghasilan



Gambar 2.1 Teori Alokasi Barang Publik

Pada gambar (a) menunjukkan kurva kemungkinan produksi (Production Possibility Curve = PPC). Kita asumsikan bentuk kurva PPC merupakan garis lurus yang menunjukkan bahwa marginal rate of transformation (MRT) merupakan suatu konstan (MRT = konstan). Dan diasumsikan pula bahwa dalam masyarakat hanya terdiri dua orang yaitu pada gambar b dan gambar c, yang masing – masing mempunyai pendapatan sebesar OM (gambar b) dan ON

(gambar c), dimana $OM + ON = OC$ (gambar a). jadi sumbu datar pada ketiga gambar menunjukkan jumlah barang public yang disediakan (fasilitas pendidikan yang disediakan) dan sumbu tegak pada gambar b dan gambar c menunjukkan jumlah pendapatan individu a dan b. individu a mencapai keseimbangan pada persinggungan antara kurva indederens dengan garis anggaran, yaitu titik F. individu a (gambar b) akan mengkonsumsi barang public (pendidikan) sebesar OG, dan penghasilan sebesar OM0.

Apabila kurva anggaran seperti yang ditunjukkan oleh MR1, maka individu a akan memilih konsumsi barang public sebanyak OG1, dan barang swasta sebanyak MM1. Karena barang public yang tersedia sebanyak OG1, maka jumlah OG1 itu yang tersedia untuk individu b.

Kurva NJ menunjukkan jumlah barang swasta yang tersedia bagi individu b dan individu b akan mencapai optimum dalam mengkonsumsi barang public dan barang swasta pada titik Q dimana kurva konsumsi, harganya berpotongan dengan kurva NJ. individu a akan berada pada titik keseimbangan konsumen (titik F), dan total produksi berada pada titik E. kedua individu mengkonsumsi barang public sebesar OG0 dan barang swasta sebesar CI0, dimana individu a mengkonsumsi MM0 barang swasta, individu b mengkonsumsi barang swasta sebanyak NL0, dan total produksi barang swasta = $MM0 + NL0 = CI0$. Solusi teori ini mempunyai karakteristik sbb :

1. Hasil analisis selaras dengan distribusi pendapatan, dimana individu a memperoleh penghasilan sebesar OM dan individu b memperoleh penghasilan sebesar ON

2. Individu a memperoleh barang swasta sebesar MM_0 dan individu b memperoleh barang swasta sebesar NL_0
3. Kedua individu membayar harga yang sama untuk barang public dan barang swasta. Setiap konsumen berada pada titik keseimbangan konsumen, yaitu dimana MRS sama dengan perbandingan harga kedua barang

$$MRS = \text{Harga barang public} / \text{harga barang swasta}$$

4. Pembayaran pajak oleh kedua individu untuk membiayai penyediaan barang public sama besarnya dengan biaya totalnya.

Misalnya :

T = pajak

P_g = harga barang public

P_s = harga barang swasta

A = individu a

$$T_a = P_g \times OG_0$$

$$\text{Slope kurva anggaran} = \frac{P_g \alpha}{p_x} = \frac{OM}{OR}$$

$$\text{Dengan menganggap } P_x = 1, \text{ maka } P_g = OM \cdot \frac{OG_0}{OR}$$

$$\text{Kita tahu bahwa} = \frac{OM}{OR} = \frac{MM_0}{MOF} = \frac{MM_0}{OG_0}$$

$$\text{Karena itu, } T_a = MM_0 \times \frac{OG_0}{OG_0} = MM_0$$

Dengan cara yang sama kita dapat mengetahui besarnya pajak yang dibayar oleh individu B, yaitu $T_B = NL_0$

$$T_a + T_b = MM_0 + NL_0 = CIO$$

Solusi dari teori ini yaitu pada tingkat efisiensi optimum :

$$MRS_a + MRS_b = MRT$$

$$= \frac{OM}{OR} + \frac{ON}{OU} = \frac{MM_0}{OG_0} + \frac{NL_0}{OG_0} = \frac{CIO}{OG_0}$$

Teori alokasi barang public melalui anggaran merupakan suatu teori analisa penyediaan barang public yang lebih sesuai dengan kenyataan (reality) karena bertitik tolak pada distribusi pendapatan awal di antara individu individu dalam masyarakat (dalam hal ini individu A dan B), dan dapat digunakan untuk menentukan beban pajak diantara para konsumen untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

Namun teori ini mempunyai kelemahan utama yaitu digunakannya kurva indifferen sebagai alat analisis yang baik dari segi teori akan tetapi kurang bermanfaat untuk aplikasi penggunaannya dalam kenyataan sehari hari.

2.1.3 Efektivitas Pembiayaan Pendidikan

Suatu upaya pendidikan disebut efektif jika hasil yang dicapai maksimum dengan biaya yang wajar. Memang secara konvensional diartikan dengan biaya yang ada, akan lebih memaksimalkan imput yang tersedia. Namun dalam pandangan ekonomi, bukan hanya hasil yang disebutkan menjadi ukuran efektif. Melainkan justru keefisienan dengan biaya terbatas dapat mencapai hasil yang maksimal.

Perencanaan pendidikan mengenal dua pendekatan biaya, ahli ekonomi neo klasik lebih mengutamakan analisis cost dan benefit. Pendekatan memilih alternative yang menghasilkan lebih banyak keuntungan daripada biaya yang dikeluarkan di sector pendidikan. Namun dalam dunia pendidikan sebenarnya sukar mengukur biaya dan manfaat terlebih mengukur keuntungan untuk masa yang akan datang. Maka peranan itu dalam perencanaan pendidikan biaya tidak memakai cost-benefit analisis tetapi cenderung memakai pendekatan cost-effectiveness analysis, perbedaan utama dari kedua analisis ini ialah dalam cost-benefit analisis alat ukurnya adalah nilai uang, misalnya jumlah murid, jumlah lulusan, jumlah putus sekolah dan lain lain.

Efektivitas sector pendidikan juga dapat diterangkan dengan jumlah siswa dan jumlah putus sekolah. Bertambahnya jumlah siswa adalah sebuah keberhasilan pendidikan sebagai akibat langsung dari biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk pengadaan fasilitas – fasilitas pendidikan (AR.Tilaar, 1995).

Menurunnya putus sekolah merupakan salah satu tujuan utama pembangunan pendidikan. Untuk memperkecil jumlah putus sekolah kebanyakan kebijaksanaan Negara – Negara di Asia memperbesar anggaran pendidikan dengan fasilitas pendidikan (Jee-Peng, 1989).

Menurut Psacharopoulos, cost-effectiveness mengacu pada output pendidikan dengan menggunakan input – input pendidikan. Standar effectiveness mengacu pada bentuk – bentuk dibawah ini:

- a. Jumlah murid yang dibuang (putus sekolah)
- b. Jumlah repetitive (mengulang pelajaran)

c. Kegagalan murid dalam ujian

Dalam mengurangi angka putus sekolah ini, kebijaksanaan pendidikan makro bertujuan mengefektifkan peranan pemerintah. Langkah utama diperlukannya pertimbangan keadilan dari beban biaya sekolah dengan diupayakannya subsidi silang untuk komponen – komponen pembiayaan pendidikan (Elfindri, 1997).

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa putus sekolah dapat diproksikan untuk menelaah tingkat efektivitas dari pembiayaan pendidikan atas dasar pengeluaran pemerintah yang digunakan untuk input – input pendidikan. Kebutuhan akan buku – buku, alat tulis dan sarana pendidikan lainnya adalah salah satu pengeluaran yang relative besar dari rumah tangga. Dengan demikian pembiayaan pemerintah salah satu tujuannya membantu memperkecil biaya yang dikeluarkan individu untuk biaya pendidikan.

Untuk mempertegas bahwa putus sekolah adalah salah satu indicator efektivitas maka akan dijelaskan kerangka hubungan sumber biaya dan alokasinya terhadap jumlah putus sekolah sebagai berikut:

- a. Pembangunan dan penyediaan prasarana dan sarana fisik sekolah oleh pemerintah akan memberikan kesempatan yang lebih luas bagi masyarakat untuk mengkonsumsi pendidikan dengan biaya yang rendah dibandingkan sekolah – sekolah swasta yang membutuhkan biaya yang tinggi sehingga dapat menurunkan jumlah putus sekolah.
- b. Peningkatan pembiayaan dengan tujuan melengkapi peralatan dan buku – buku sekolah oleh pemerintah menghindari keluarnya biaya

individu untuk membeli peralatan dan buku – buku, dengan berkurangnya beban pendidikan individu akan mengurangi jumlah putus sekolah karena tidak sanggup menanggung beban pendidikan.

2.2 Hubungan Anggaran Pendidikan dengan Mutu Pendidikan

Anggaran pendidikan yang merupakan dana merupakan salah satu input suatu kegiatan adalah sumber daya yang sangat penting dalam pendidikan. Tanpa dukungan dana yang cukup akan sangat sulit mutu pendidikan yang berkualitas dicapai. Sejalan dengan itu, Supriadi (2001) menyatakan bahwa biaya pendidikan merupakan salah satu komponen masukan yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan. Anggaran pendidikan diperlukan untuk memfasilitasi pelaksanaan kebijakan dan program sekolah, terlaksananya aktifitas sekolah (intra dan ekstra), dan dapat mengembangkan sekolah sebagai lembaga pendidikan yang bermutu. Dalam buku panduan bantuan operasional sekolah (BOS) departemen pendidikan nasional, dinyatakan dana bantuan operasional sekolah diutamakan membiayai :

1. Pembiayaan seluruh kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru :
 - a. Biaya pendaftaran
 - b. Pengadaan formulir
 - c. Administrasi pendaftaran
 - d. Pendaftaran ulang, dan
 - e. Kegiatan lain yang berkaitan langsung dengan kegiatan tersebut

2. Pembelian buku teks pelajaran (diluar buku yang telah dibeli dari dana BOS buku) dan buku referensi untuk dikoleksi di perpustakaan
3. Pembiayaan kegiatan pembelajaran remedial, pembelajaran pengayaan, olahraga, kesenian, karya ilmiah remaja, pramuka, palang merah remaja, dll
4. Pembiayaan ulangan harian, ulangan umum, ujian sekolah / madrasah / ponpes dan laporan hasil belajar siswa
5. Pembelian bahan habis pakai seperti buku tulis, kapur tulis, pensil, bahan pratikum, buku induk siswa, buku inventaris, langganan Koran, kopi, teh, gula untuk kebutuhan sehari hari di sekolah / madrasah / ponpes
6. Pembiayaan langganan daya dan jasa : listrik, air, telepon, termasuk untuk pemasangan baru jika sudah ada jaringan di sekitar sekolah / madrasah
7. Pembiayaan perawatan sekolah/ madrasah/ ponpes seperti pengecatan, perbaikan atap bocor, perbaikan pintu dan jendela, perbaikan sanitasi sekolah dan perawatan sekolah lainnya
8. Pembiayaan honorarium bulanan guru honorer dan tenaga honorer, tambahan insentif rutin bagi kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan ditanggung sepenuhnya oleh pemerintahan daerah
8. Pengembangan profesi guru : pelatihan, KKG/MGMP.

9. Pemberian bantuan biaya transportasi bagi siswa miskin yang menghadapi masalah biaya transport dari dan ke sekolah/madrasah/ponpes
10. Pembiayaan pengelolaan Bos : alat tulis kantor , penggandaan, surat menyurat dan penyusunan laporan

Fatah (1998) menyatakan factor yang mempengaruhi mutu pendidikan yaitu :

1. Komponen masukan seperti karakteristik siswa, guru, biaya, sarana dan prasarana pendidikan
2. Proses pendidikan meliputi pengelolaan proses belajar mengajar dan pengelolaan sekolah

Dari pendapat diatas, kualitas dan mutu pendidikan sekolah ditentukan oleh anggaran pendidikan, baik dalam besarnya, pengalokasian yang tepat, maupun pemanfaatan realisasi biaya yang mengarah kepada kebutuhan proses belajar mengajar, kemampuan pengelolaan mutu guru, mutu alat, mutu bahan, dan mutu siswa akan berkaitan satu sama lainnya dalam proses belajar mengajar sekolah. Keterkaitan komponen tersebut akan menciptakan kondisi yang baik untuk proses belajar mengajar dan pada gilirannya akan berpengaruh dan memberikan kontribusi dalam pencapaian prestasi belajar siswa (hasil belajar).

2.3 Pola Penganggaran Pendidikan di Indonesia dan Sumatera Barat

Dalam penyelenggaraan pendidikan tingkat nasional maupun daerah mengalami transisi yang sangat signifikan dalam pengelolaan sumber-sumber daya yang ada dalam bidang pendidikan terutama dalam hal pendanaan pendidikan . Dalam hal ini pelaksanaan pendidikan harus disertai dengan peningkatan peran sumber-sumber daya pendidikan yang telah tertuang dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab I Ketentuan Umum pasal 1 ayat 23 yang menjelaskan Sumber daya pendidikan adalah segala sesuatu yang dipergunakan dalam penyelenggaraan pendidikan meliputi tenaga kependidikan, masyarakat, dana, sarana, dan prasarana. Dalam hal ini pembiayaan pendidikan merupakan hal sangat penting bagi pendidikan di daerah. Lebih lanjut dalam pasal 47 disebutkan tentang sumber pendanaan pendidikan yaitu

1. Sumber pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, dan keberlanjutan.
2. Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat mengerahkan sumber daya yang ada sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Ketentuan mengenai sumber pendanaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah

Amanat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 4 juga menerangkan dalam hal pembiayaan pendidikan bahwa;

”Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional”

Sejalan dengan itu maka dalam implementasi kebijakan pendidikan di daerah akan berjalan dengan baik apabila didukung oleh sumber daya pendidikan (pembiayaan pendidikan) yang memadai dan dapat diandalkan untuk meningkatkan mutu dan kualitas sumber daya di daerah.

Dengan adanya perubahan kewenangan pengelolaan pendidikan dengan segera mengubah pola pembiayaan sektor pendidikan. Sebelum otonomi daerah, praktis hanya pembiayaan sekolah dasar (SD) yang menjadi tanggung jawab Pemda, sedangkan SLTP dan SLTA (dan juga perguruan tinggi) menjadi tanggung jawab Pusat, seperti yang tertuang dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2003 pasal 46:

1. Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.
2. Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab menyediakan anggaran pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Ketentuan mengenai tanggung jawab pendanaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Pembiayaan SLTP dan SLTA dilakukan melalui Kanwil Depdiknas (di tingkat propinsi) dan Kandeptdiknas (di tingkat kabupaten/kota). Setelah diberlakukannya otonomi daerah, seluruh pengelolaan sekolah dari SD hingga SLTA menjadi tanggung jawab Pemda. Konsekwensinya, tidak ada lagi Kanwil dan Kandeptdiknas, yang ada hanyalah Dinas Pendidikan di tingkat kabupaten/kota yang berada di bawah kendali Pemda, dan Dinas Pendidikan propinsi yang berada di bawah kendali Pemprop. Antara Dinas Pendidikan kabupaten/kota dengan Dinas Pendidikan propinsi tidak ada hubungan hierarkhis, sedangkan propinsi masih tetap mengemban amanat sebagai perwakilan pemerintah pusat. Dengan konfigurasi kelembagaan seperti itu, jelas bahwa Pusat tidak lagi punya “tangan” di daerah untuk mengimplementasikan program-programnya. Implikasinya, setiap program di tingkat sekolah harus dilakukan melalui koordinasi dengan Pemda, atau khususnya Dinas Pendidikan kabupaten/kota.

Dengan konfigurasi kelembagaan yang seperti itu pula, pola pembiayaan pendidikan mengalami perubahan yang cukup mendasar. Pasal 48 Undang-undang No. 20 Tahun 2003 menjelaskan bahwa; (1) pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik, (2) Ketentuan mengenai pengelolaan dana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Dengan demikian daerah memiliki tanggung jawab yang sangat besar untuk membiayai sektor pendidikan dengan menggunakan APBD-nya. Dukungan

dari Pusat (dan Propinsi) tetap dimungkinkan, tetapi juga harus melalui mekanisme APBD, atau paling tidak tercatat di dalam APBD kabupaten/kota.

Tantangan pertama yang harus dihadapi oleh para pengelola pendidikan adalah masalah pendanaan. Sebagai ilustrasi, rendahnya kualitas gedung sekolah, terutama SD, merupakan salah satu dampak keterbatasan kemampuan pemerintah dalam memobilisasi dana untuk sektor pendidikan. Di sisi lain, UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) memberi beban yang sangat berat bagi pemerintah. Pasal 49 menyatakan sebagai berikut;

1. Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
2. Gaji guru dan dosen yang diangkat oleh Pemerintah dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
3. Dana pendidikan dari Pemerintah dan pemerintah daerah untuk satuan pendidikan diberikan dalam bentuk hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Dana pendidikan dari Pemerintah kepada pemerintah daerah diberikan dalam bentuk hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Ketentuan mengenai pengalokasian dana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Di atas kertas, Pemda memang memiliki beberapa sumber keuangan daerah, seperti dana perimbangan (DAU, DAK dan Dana Bagi Hasil), PAD dan pinjaman. Tapi pada kenyataannya, rata-rata peranan PAD dalam APBD hanya sekitar 7%. Sementara itu, rata-rata tertimbang rasio dana perimbangan terhadap pengeluaran rutin adalah 1,4 yang menunjukkan bahwa tidak banyak dana perimbangan yang bisa digunakan untuk keperluan di luar anggaran rutin.

Jelas bahwa Pemda memiliki tanggung jawab yang besar dan bersifat jangka panjang di sektor pendidikan, tetapi tidak memiliki sumber dana yang cukup dan stabil untuk mendanai. Jika situasinya tidak berubah, Daerah tidak akan mampu memenuhi 20% anggaran untuk pendidikan seperti yang diamanatkan UU Sisdiknas.

2.4 Konsep Anggaran Pendidikan (Budget)

2.4.1 Pengertian Anggaran

Kebijaksanaan daerah terhadap pendapatan dan pengeluaran daerah direncanakan dalam anggaran, menurut ahli ekonomi anggaran dapat diartikan “kebijaksanaan daerah terhadap pendapatan dan pengeluaran daerah direncanakan dalam anggaran”. Disisi lain ada yang berpendapat bahwa anggaran adalah suatu daftar atau pernyataan terperinci tentang penerimaan dan pengeluaran Negara yang diharapkan dalam jangka waktu tertentu yang biasa adalah satu tahun (Jalal, 2001).

Sedangkan menurut Due and Friendleander menyatakan bahwa anggaran adalah suatu rencana pembelanjaan yang merupakan suatu dasar untuk

pengambilan keputusan pengeluaran dan pengawasan selanjutnya atas pengeluaran pengeluaran (Jalal, 2001)

Dari kedua pendapat diatas, diambil suatu rumusan bahwa anggaran adalah rencana yang telah disusun secara sistematis dalam bentuk angka dari uang dan merupakan dasar untuk mengambil keputusan penerimaan, pengeluaran, dan pengawasan dalam waktu ke waktu.

Di sisi lain, Fattah berpendapat bahwa anggaran adalah rencana operasional yang dinyatakan secara kuantitatif dalam bentuk satuan uang yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan lembaga dalam kurun waktu tertentu. Oleh karena itu, dalam anggaran tergambar kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh suatu lembaga (Fattah, 2006).

Anggaran daerah menyangkut rencana kegiatan daerah baik yang bersifat rutin maupun kegiatan pembangunan. Untuk menyelenggarakan untuk menyelenggarakan tugas tugas pemerintah dan pembangunan, yang terdiri dari berbagai macam jenis kegiatan maka diperlukan rencana keuangan yang akan dijalankan pada masa yang akan datang (biasanya 1 tahun). Rencana kegiatan ini Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang terdiri dari :

1. Anggaran pendapatan rutin
2. Anggaran belanja rutin
3. Anggaran pendapatan pembangunan
4. Anggaran belanja pembangunan

2.4.2 Karakteristik Anggaran Pendidikan

Anggaran pada dasarnya terdiri dari dua sisi, yaitu sisi **penerimaan** dan sisi **pengeluaran**. Sisi penerimaan atau perolehan biaya ditentukan oleh besarnya dana yang diterima oleh lembaga dari setiap sumber dana.

Besarnya biaya pendidikan yang bersumber dari pemerintah ditentukan berdasarkan kebijakan keuangan pemerintah di tingkat pusat dan daerah setelah mempertimbangkan skala prioritas. Pemerintah membantu sekolah secara finansial dalam beberapa cara, misalnya:

- a. Memberikan dana hibah untuk sekolah
- b. Membayar gaji guru
- c. Membantu proyek pencarian dana sekolah berupa penyediaan tenaga ahli, bahan, dan peralatan.
- d. Membiayai proyek pembangunan dan rehabilitasi sekolah untuk daerah tertentu.

Pemerintah juga memberikan sumbangan tak langsung melalui:

- a. Pelatihan guru
- b. Pelatihan kepala sekolah
- c. Pelatihan pengawas
- d. Pelatihan tenaga kependidikan lainnya (pustakawan, petugas lab.)
- e. Penyiapan silabus
- f. Pelatihan penggunaan sarana prasarana pemberian kesempatan pada guru untuk melanjutkan pendidikan. (Fattah, 2004)

Besarnya penerimaan dari masyarakat baik dari perorangan maupun lembaga, yayasan, berupa uang tunai, barang, hadiah, atau pinjaman bergantung pada kemampuan masyarakat setempat dalam memajukan dunia pendidikan. Besarnya dana yang diterima dari orang tua siswa berupa iuran BP3 (Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan) dan SPP (Sumbangan Pembinaan Pendidikan) yang langsung diterima sekolah didasarkan atas kemampuan orang tua siswa dan ditentukan oleh pemerintah atau yayasan. Sedangkan besarnya penerimaan dari sumber-sumber lain termasuk dalam golongan ini bantuan atau pinjaman dari luar negeri yang diperuntukkan bagi pendidikan, seperti bantuan UNICEF atau UNESCO.

Sedangkan sisi pengeluaran terdiri dari alokasi biaya pendidikan untuk setiap komponen yang harus dibiayai. Dari seluruh penerimaan biaya, sebagian dipergunakan untuk membiayai kegiatan administrasi, ketatausahaan, sarana prasarana pendidikan; dan sebagian diberikan kepada sekolah melalui beberapa saluran. (Fattah, 2006)

Pimpinan Pendidikan (kepala sekolah) harus memiliki jiwa manajer yang baik dalam mengatur anggaran sekolah, antara pemasukan dan pengeluaran harus direncanakan secara baik dan matang. Perencanaan anggaran harus dilakukan bersama-sama antara pimpinan (kepala sekolah) beserta para guru, karyawan, komite sekolah maupun orang tua siswa. Hal ini dimaksudkan agar perencanaan lebih transparan dan semua pihak terlibat langsung dan mengetahui keadaan sekolah yang sebenarnya.

2.4.3 Anggaran Pendidikan dalam Kacamata UUD 1945 dan UU Sisdiknas 2003

Dalam UUD 1945 dan Amandemennya Bab XIII tentang Pendidikan dan Kebudayaan Pasal 31 ayat (4) berbunyi:

*Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya **dua puluh persen** dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.*

Dalam Undang-undang RI No. 20 Tahun 2003 SISDIKNAS Bagian Keempat tentang Pengalokasian Dana Pendidikan Pasal 49 ayat (1) berbunyi:

Dana Pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

2.5 Desentralisasi Pendidikan

Desentralisasi merupakan simbol adanya kepercayaan pemerintah pusat kepada daerah. Ini akan dengan sendirinya mengembalikan harga diri pemerintah dan masyarakat daerah. Kalau dalam sistem sentralistik mereka tidak bisa berbuat banyak dalam mengatasi berbagai masalah, dalam sistem otonomi ini mereka di tantang untuk secara kreatif menentukan solusi-solusi atas berbagai masalah yang dihadapi sehingga pemerintah pusat tidak perlu mempunyai aparat sendiri di daerah kecuali dalam batas-batas yang sangat diperlukan. Untuk itu yang perlu

dicermati dalam desentralisasi adalah agen (*dekonsentrasi*) dan badan otonom (*devolusi*) atau kalau mengacu pada Smith bahwa desentralisasi mengimplikasikan dua kondisi fundamental yaitu *pertama*, pemerintahan sendiri (lokal) bahwa lokal mempunyai pemerintahan sendiri melalui institusi politik yang berakar dari teritorial yang menjadi kewenangan. Institusi tersebut didirikan oleh sistem politik daerah (*dekonsentrasi*), *kedua*, institusi tersebut akan direkrut secara demokratis (*devolusi*) (Rondenelli, 1998).

Dari dimensi konsep pemerintah lokal, Undang-undang No. 22 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 yang memang membawa pergeseran sejumlah model dan paradigma. Pemerintah lokal yang dulunya *Structural efficiency model* yang menekankan efisiensi dan keseragaman ditinggalkan dan dianut *local democracy model* yang menekankan pada nilai demokrasi dan keberagaman dalam penyelenggaraan pemerintah lokal. Seiring dengan pergeseran model tersebut terjadi pula dari penguatan dekonsentrasi ke penguatan desentralisasi (Rondenelli, 1988).

Pergeseran model dan paradigma tersebut memungkinkan berlangsungnya penyelenggaraan pemerintah yang responsif terhadap kepentingan publik dan memelihara suatu mekanisme pengambilan keputusan yang kuat pada asas pertanggungjawaban publik. Sehingga dalam prakteknya dengan adanya Undang-undang Otonomi Daerah kewenangan pengelolaan pendidikan berubah dari sistem sentralisasi ke desentralisasi. Desentralisasi pendidikan berarti terjadinya pelimpahan kekuasaan dan kewenangan yang lebih luas kepada daerah untuk

membuat perencanaan dan mengambil keputusannya sendiri dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi di bidang pendidikan (Halim, 2001: 15)

Berdasarkan PP Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan propinsi sebagai daerah otonom, pada kelompok bidang pendidikan dan kebudayaan disebutkan bahwa kewenangan pemerintah meliputi:

1. Penetapan standar kompetensi siswa dan warga belajar, serta pengaturan kurikulum nasional dan penilaian hasil belajar secara nasional, serta pedoman pelaksanaannya
2. Penetapan standar materi pelajaran pokok
3. Penetapan persyaratan perolehan dan penggunaan gelar akademik
4. Penetapan pedoman pembiayaan penyelenggaraan pendidikan
5. Penetapan persyaratan penerimaan, perpindahan sertifikasi siswa, warga belajar dan mahasiswa
6. Penetapan persyaratan peningkatan/zoning, pencarian, pemanfaatan, pemindahan, penggandaan, sistem pengamanan dan kepemilikan benda cagar budaya, serta persyaratan penelitian arkeologi
7. Pemanfaatan hasil penelitian arkeologi nasional serta pengelolaan museum nasional, galeri nasional, pemanfaatan naskah sumber arsip, dan monumen yang diakui secara internasional
8. Penetapan kalender pendidikan dan jumlah jam belajar efektif setiap tahun bagi pendidikan dasar, menengah dan luar sekolah
9. Pengaturan dan pengembangan pendidikan tinggi, pendidikan jarak jauh, serta pengaturan sekolah internasional

10. Pembinaan dan pengembangan bahasa dan sastra Indonesia sementara

itu, kewenangan pemerintah propinsi meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Penetapan kebijakan tentang penerimaan siswa dan mahasiswa dari masyarakat minoritas, terbelakang atau tidak mampu,
2. Penyediaan bantuan pengadaan buku pelajaran pokok/ modul pendidikan untuk taman kanak-kanak, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan luar sekolah
3. Mendukung/membantu pengaturan kurikulum, akreditasi, dan pengangkatan tenaga akademis
4. Pertimbangan pembukaan dan penutupan perguruan tinggi
5. Penyelenggaraan sekolah luar biasa dan balai pelatihan atau penataran guru
6. Penyelenggaraan museum propinsi, suaka peninggalan sejarah, kepurbakalaan, kajian sejarah dan nilai tradisonal, serta pengembangan bahasa dan budaya daerah

Desentralisasi pendidikan melibatkan beberapa pihak sekaligus yaitu :

1. Pemimpin politik dan pengambil kebijakan. Desentralisasi pendidikan sangat bersifat politis, artinya sangat mempengaruhi mayoritas penduduk. Bagi pengambil kebijakan, desentralisasi dapat digunakan untuk meraih kekuasaan dan dukungan publik
2. Pegawai departemen. Selama proses desentralisasi, pegawai departemen berkepentingan untuk mempertahankan pekerjaan dan

penghasilannya. Mereka juga menginginkan terjaganya sejumlah kekuasaan / kewenangan administratif

3. Guru. Kepentingan utamanya adalah gaji dan kelangsungan pekerjaannya. Biasanya guru bersikap terbuka terhadap upaya peningkatan kapabilitas, namun bersikap kritis terhadap hal hal yang membahayakan kelangsungan pekerjaan dan jaminan atas imbalan mereka.
4. Persatuan guru. Walaupun organisasi seperti ini diyakini memperjuangkan nasib guru, mereka memiliki kepentingan untuk mempertahankan posisi tawar menawar di tingkat pusat
5. Universitas. Institusi pendidikan tinggi memiliki kepentingan terhadap sistem pendidikan dasar dan menengah, karena mereka menggunakan lulusan dari sistem pendidikan tersebut
6. Orang tua. Fokus perhatian orang tua adalah kepada mutu pendidikan. Proses desentralisasi seyogianya memberdayakan orang tua untuk dapat ikut serta dalam proses pengambilan keputusan pendidikan
7. Masyarakat lokal. Walaupun sebagian besar anggota kelompok ini adalah orang tua, didalamnya termasuk pula kalangan dunia usaha dan dunia industri yang merupakan salah satu pengguna lulusan sistem pendidikan lokal tersebut
8. Siswa. Siswa sekolah dasar biasanya belum terlalu sadar akan hak mereka atas pendidikan. Pada kenyataannya, siswa merupakan

pihak yang paling berkepentingan dengan mutu pengajaran yang mereka terima.

2.6 Tinjauan Pustaka

Supriadi (2007) dalam tulisannya meneliti tentang anatomi biaya pendidikan di SD, SMP, SMU, dan SMK. Penelitian ini menggunakan variabel 1. Biaya pendidikan yang dikeluarkan pemerintah daerah dan pusat, 2. Biaya langsung dan tidak langsung yang dibayarkan keluarga untuk anaknya yang bersekolah, 3. Biaya partisipasi masyarakat ke sekolah. Hasil yang diperoleh adalah : 1. Subsidi pemerintah meningkat seiring dengan meningkatnya jenjang pendidikan, 2. Kontribusi keluarga jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kontribusi pemerintah, 3. Kontribusi masyarakat sangat rendah, 4. Jenjang pendidikan yang berlaku wajib belajar, dari SD ke SMP menuntut masyarakat mengeluarkan biaya besar.

Syam (2007) dalam tulisannya meneliti tentang antara partisipasi anggaran dan penggunaan anggaran sebagai alat ukur kinerja orientasi manajerial. Penelitian ini menggunakan variabel: 1. Komitmen profesional yang meliputi mengajar, meneliti, dan pemberian pelajaran kepada masyarakat, 2. Partisipasi dan pengguna anggaran, 3. Orientasi manajerial, 4. Kontak peran. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah : 1. Orientasi profesional memberi pengaruh terhadap konflik peran utama jika di modernisasi oleh orientasi manajerial, 2. Perguruan tinggi hendaknya memisahkan antara orientasi profesional dan orientasi manajerial

Sukmadinata, dkk (2008) melakukan penelitian dengan analisa pengendalian mutu pendidikan dengan variabel : 1. Model pengendalian pengajaran dan bimbingan di SMK, 2. Model manajerial pendidikan di SMK, 3. Mutu proses pembelajaran dan hasil pendidikan di SMK. Hasil yang diperoleh ternyata Mutu pendidikan (proses dan hasil pembelajaran) dengan menerapkan model pengendalian lebih baik daripada tidak menggunakan model pengendalian.

Roni Ekha Putra,dkk (2009) yang meneliti Pembiayaan Pendidikan di Era Otonomi Daerah (studi kasus Kabupaten Solok) dengan variabel : 1. Dana APBD , 2. Alokasi Belanja Langsung Pendidikan, 3. Sumber Dana Pendidikan . Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah Alokasi pengeluaran pendidikan masih menempatkan pengeluaran rutin dan administratif dalam pos yang cukup besar.

2.7 Hipotesis

Berdasarkan rumusan masalah dan tinjauan pustaka dari berbagai hasil kajian empiris yang telah dilakukan peneliti-peneliti sebelumnya, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian ini sebagai berikut:

1. Diduga alokasi APBD dari pemerintah berpengaruh terhadap jumlah siswa putus sekolah di Sumatera Barat
2. Diduga alokasi anggaran Beasiswa BOS dari pemerintah berpengaruh terhadap jumlah siswa putus sekolah di Sumatera Barat
3. Diduga Biaya Rumah Tangga berpengaruh terhadap jumlah siswa putus sekolah di Sumatera Barat

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Sekunder tahun 2007 hingga 2011. Pada dasarnya banyak variabel yang mempengaruhi efektivitas alokasi anggaran pendidikan dasar, dalam tulisan ini penulis menganalisis ke jumlah siswa putus sekolah jenjang pendidikan dasar (variabel dependent) terdiri dari Alokasi APBD untuk sector pendidikan (*dalam satuan milyaran rupiah*), Jumlah BOS (*dalam satuan milyaran rupiah*), Jumlah Anggaran Rumah Tangga (*dalam satuan jutaan rupiah*) Variabel-variabel tersebut merupakan variabel independen (variabel bebas).

Sumber data tersebut diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Barat, Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, dan Susenas. Data yang digunakan penulis juga bersumber dari makalah seminar, hasil penelitian sebelumnya dan buku-buku literatur yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.

3.2 Analisis Data

3.2.1 Analisis Kualitatif

Analisis Kualitatif adalah analisis yang menguraikan dengan jelas tentang data yang diperoleh dari penelitian dengan jalan memberikan pengertian keterangan dan tafsiran terhadap data.

3.2.2 Analisis Kuantitatif

Analisis Kuantitatif ini berupa angka-angka yang dianalisis dan akan menghasilkan analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis atau metode statistik.

Dalam penelitian ini, variabel yang digunakan dapat digambarkan dengan fungsi sebagai berikut :

$$Y = F(X_1, X_2, X_3) \dots\dots\dots (1)$$

Dimana :

Y = Jumlah Siswa Putus Sekolah pada Jenjang Pendidikan Dasar

X_1 = Alokasi APBD untuk sector pendidikan

X_2 = Jumlah BOS

X_3 = Jumlah Anggaran Rumah Tangga

Untuk melihat dan mengetahui pengaruh variabel-variabel bebas terhadap Efektivitas Alokasi Anggaran Pendidikan Dasar dapat di hitung dengan menggunakan regresi linear sebagai berikut :

$$Y = \beta_0 - \beta_1 \log X_1 - \beta_2 \log X_2 - \beta_3 \log X_3 + \varepsilon \dots\dots\dots (2)$$

Dimana :

$\beta_0, \beta_1, \beta_2, \beta_3$ = Konstanta & Koefisien Regresi

Y = Jumlah Siswa Putus Sekolah Jenjang Pendidikan Dasar

X_1 = Alokasi APBD untuk sector pendidikan

X_2 = Jumlah BOS

X_3 = Jumlah Anggaran Rumah Tangga

ε = Kesalahan pengganggu (Error Term)

3.3 Definisi Operasional

Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Rasio Jumlah Siswa Putus Sekolah pada Jenjang Pendidikan Dasar dengan Jumlah Siswa Pendidikan dasar yaitu perbandingan jumlah siswa yang mengalami putus sekolah pada jenjang pendidikan dasar dengan jumlah siswa pendidikan dasar saat itu (7th – 15th) di Provinsi Sumatera Barat.

$$Y = \left| \frac{JSPSt}{JSt} \right|$$

Variabel independen dalam studi ini adalah:

1. Alokasi APBD untuk jenjang pendidikan dasar (dinotasikan dengan: X_1) adalah jumlah dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang dialokasikan untuk sector pendidikan.
2. Jumlah BOS (dinotasikan dengan: X_2) adalah jumlah dana atau anggaran BOS yang dialokasikan pada siswa kurang mampu berprestasi pada jenjang pendidikan dasar Provinsi Sumatera Barat.
3. Jumlah Anggaran Rumah Tangga (dinotasikan dengan: X_3) adalah dana bantuan atau subsidi atau sumbangan yang diterima oleh pihak sekolah dari orang tua murid baik itu berupa dana pembangunan maupun yang lainnya.

3.4 Uji Statistik

3.4.1 Koefisien Determinasi (R – square)

Koefisien determinasi ini dilakukan untuk melihat seberapa besar kemampuan variabel independen memberi penjelasan terhadap variabel dependen.

Nilai R^2 didapat dengan menggunakan model sebagai berikut:

$$R^2 = \frac{b_1 \sum x_1 y_1 + b_2 \sum x_2 y_2 + b_3 \sum x_3 y_3}{\sum y^2}$$

Nilai R^2 berkisar antara 0 sampai 1 ($0 < R^2 \leq 1$). Jika nilai R^2 mendekati 0 (nol) maka kontribusi seluruh variable bebas terhadap variable terikat sangat rendah dan hubungannya cenderung sangat lemah.

Jika R^2 mendekati 1 (satu) maka kontribusi seluruh variable bebas terhadap variable terikat cenderung sangat kuat atau mendekati sempurna.

Jika nilai $R^2 = 0$ maka kontribusi seluruh variable bebas terhadap variable terikat tidak ada. Dan jika nilai $R^2 = 1$ maka 100% kontribusi seluruh variable bebas terhadap variable terikat.

3.4.2 Uji F – statistik (Uji Keseluruhan)

Uji F – statistik ini dilakukan untuk melihat seberapa besar pengaruh variabel independen secara bersama – sama terhadap variabel dependen. Untuk pengujian ini digunakan hipotesa sebagai berikut :

$H_0 : b_1 = b_2 \dots \dots \dots b_n = 0$ (tidak ada pengaruh)

$H_a : b_1 \neq 0 \dots \dots \dots n \neq 0$ (ada pengaruh)

Pengujian ini dilakukan untuk membandingkan nilai F - hitung dengan dengan F - tabel. Jika F – hitung > F – tabel maka H_0 ditolak dan hipotesa alternatif diterima,

yang berarti variabel independen secara bersama – sama mempengaruhi variabel dependen. Jika $F - \text{hitung} < F - \text{table}$ maka hipotesa alternatif diterima, yang berarti variabel independen secara bersama – sama tidak mempengaruhi variabel dependen. Nilai $F - \text{hitung}$ dapat diperoleh dengan rumus:

$$F^* = \frac{R^2 / k - 1}{(1 - R^2) / (n - k)}$$

Dimana :

R^2 = koefisien determinasi

K = jumlah variabel independen ditambah *intercept* dari suatu model persamaan

n = jumlah sampel

Kriteria pengambilan keputusan :

$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = 0$ H_0 diterima ($F^* < F\text{-tabel}$) artinya variabel independen secara parsial tidak berpengaruh nyata terhadap variabel dependen

$H_a : \beta_1 \neq \beta_2 \neq 0$ H_a diterima ($F^* > F\text{-tabel}$) artinya variabel independen secara parsial berpengaruh nyata terhadap variabel dependen

3.4.3 Uji t-statistik

Uji t merupakan suatu pengujian yang bertujuan untuk mengetahui apakah masing – masing koefisien regresi signifikan atau tidak terhadap variabel terikat (*dependent*) dengan menganggap variabel bebas (*independent*) lainnya konstan.

Dalam uji ini digunakan hipotesis sebagai berikut :

$$H_0 : b_i = 0$$

$$H_a : b_i \neq 0$$

Hipotesa nol (H_0) adalah hipotesa yang menyatakan tidak adanya pengaruh dari variable bebas terhadap variable yang tidak bebasnya, sedangkan hipotesa alternative (H_a) merupakan hipotesa yang menyatakan adanya pengaruh dari variable bebas terhadap variable yang tidak bebasnya. Pengujian dilakukan dengan membandingkan nilai t yang didapat dari perhitungan dengan nilai t yang ada pada table t dengan tingkat kesalahan (α) sebesar 5% dan derajat kebebasan atau degree of freedom(df) sebesar $n - k$, dengan ketentuan pengambilan keputusan sbb:

$H_0 : \beta = 0$ H_0 diterima ($t^* < t\text{-tabel}$) maka hipotesa nol diterima dan hipotesa alternatif ditolak, artinya variabel independen secara parsial tidak berpengaruh nyata terhadap variabel dependen.

$H_a : \beta \neq 0$ H_a diterima ($t^* > t\text{-tabel}$) maka hipotesa nol ditolak dan hipotesa alternatif ditolak, artinya variabel independen secara parsial berpengaruh nyata terhadap variabel independen.

Nilai t-hitung diperoleh rumus:

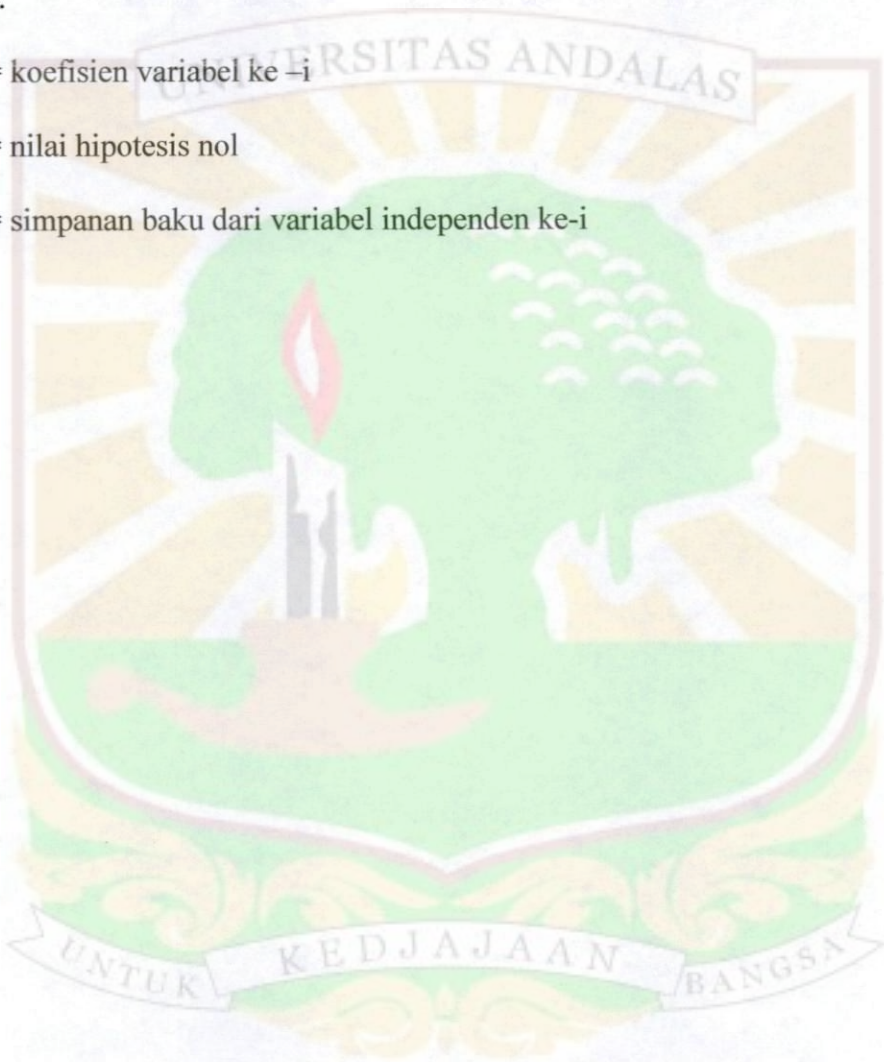
$$t^* = \frac{(b_i - b)}{S_{b_i}}$$

Dimana :

b_i = koefisien variabel ke -i

b = nilai hipotesis nol

S_{b_i} = simpangan baku dari variabel independen ke-i



BAB IV

GAMBARAN UMUM

4.1 Gambaran Umum Propinsi Sumatera Barat

Propinsi Sumatera Barat secara geografis terletak di antara $0^{\circ} 54^{\circ}$ Lintang Utara dan $3^{\circ} 30^{\circ}$ Lintang Selatan dan $98^{\circ} 36^{\circ}$ dan $101^{\circ} 53^{\circ}$ Bujur Timur. Sebelum pemekaran propinsi Sumatera Barat mempunyai 14 kabupaten/kota, setelah pemekaran kabupaten/kota Propinsi Sumatera Barat berjumlah 19 atau bertambah 5 kabupaten/kota baru. Luas wilayah Propinsi Sumatera Barat sekitar 42297,30 km², setara dengan 2,17 % dari luas wilayah NKRI.

Tabel 4.1 Luas Wilayah Kabupaten/Kota Propinsi Sumatera Barat

No	Kabupaten dan Kota	Luas Daerah (Km ²)
1	Kepulauan Mentawai	6011.35
2	Pesisir Selatan	5794.95
3	Solok	3738.00
4	Swl/Sijunjung	3130.80
5	Tanah Datar	1336.00
6	Padang Pariaman	1328.79
7	Agam	2232.30
8	50 Kota	3354.30
9	Pasaman	4447.63
10	Solok Selatan	3346.20
11	Darmasraya	2961.13
12	Pasaman Barat	3387.77
13	Padang	694.96
14	Kota Solok	57.64
15	Sawahlunto	273.45
16	Padang Panjang	23.00
17	Bukittinggi	25.24
18	Payakumbuh	80.43
19	Pariaman	73.36
	Sumbar	42297.30

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

Sementara batas-batas wilayah Sumatera Barat dengan propinsi lainnya sebagai berikut Sebelah Utara berbatasan dengan Propinsi Sumatera Utara, Sebelah Selatan berbatasan dengan Propinsi Bengkulu dan Jambi, Sebelah Timur berbatasan dengan Propinsi Jambi dan Riau, Sebelah Barat berbatasan dengan Samudra Hindia.

4.2 Kondisi Pendidikan Dasar di Sumatera Barat

4.2.1 Permasalahan Pendidikan

Permasalahan pokok yang dihadapi dalam sektor pendidikan di Sumatera Barat khususnya pada pendidikan dasar dapat dikategorikan ke dalam tiga kategori utama yaitu masalah pemerataan dan perluasan akses pendidikan, masalah mutu, relevansi dan daya saing, masalah tata kelola, akuntabilitas, dan pencitraan publik, yang dikenal dengan tiga pola pembangunan pendidikan.

Partisipasi pendidikan di tingkat SD sudah melebihi dari 100%, tetapi semakin tinggi jenjang pendidikan, semakin rendah tingkat partisipasi untuk mensukseskan program wajib belajar 9 Tahun, perlu perhatian khusus pada jenjang pendidikan SLTP. Jika nasional menargetkan akan terjadi ketuntasan pada era MDGs 2015 nanti, Sumatera Barat diperkirakan sudah harus menuntaskan Wajib Belajar 9 Tahun pada Tahun 2012 nanti. Walaupun angka partisipasi menunjukkan kecenderungan menaik sejak tahun 2006, namun secara kumulatif angka tersebut masih menunjukkan persentase yang rendah.

Partisipasi siswa jenjang pendidikan dasar dan menengah ditunjukkan dengan tabel 4.2 berikut:

Tabel 4.2.1 Partisipasi Siswa Jenjang Pendidikan Dasar Provinsi Sumatera Barat

NO	Kab/ Kota	2006/2007		2007/2008		2008/2009		2009/2010		2010/2011	
		SD	SMP	SD	SMP	SD	SMP	SD	SMP	SD	SMP
1	Agam	61.916	14.313	61.576	14.886	54.824	24.086	60.408	16.402	58.898	18.203
2	Pasaman	38.478	8.742	38.943	9.190	39.836	14.178	39.481	9.508	38.938	10.345
3	50 Kota	45.028	10.415	45.521	11.369	46.222	14.470	47.256	11.970	47.659	12.584
4	Kab Solok	50.358	11.979	50.157	13.024	39.899	18.095	42.012	8.950	45.920	10.928
5	Kab pdg. Pariamn	61.884	17.387	60.024	18.713	55.992	16.475	59.849	18.808	61.820	17.637
6	Kab Pessel	61.475	17.446	62.238	18.422	62.586	21.820	64.101	19.823	63.638	17.453
7	Kab. Tanah Datar	43.418	11.186	43.337	11.746	34.284	12.187	42.788	12.430	41.532	12.243
8	Kab. Saw. Sjnlg	26.927	6.714	27.895	7.846	27.717	7.506	29.411	8.271	28.484	7.282
9	Kab. Solsel	16.605	4.446	12.968	5.238	8.457	4.946	20.815	5.396	17.463	5.124
10	Kab. Dharmasraya	25.602	5.988	23.540	6.365	24.445	8.581	24.479	6.939	23.324	7.774
11	Kab. Pas. Barat	51.947	11.083	52.182	12.526	51.539	14.777	52.379	13.363	51.636	12.858
12	Kota Bukittinggi	11.409	5.001	12.228	5.229	11.955	7.212	12.159	5.617	11.757	5.252
13	Kota Padang	82.124	27.627	85.367	28.944	84.014	30.072	82.035	25.535	80.235	24.521
14	Kota Pdg. Pjg	5.605	2.217	5.671	2.272	6.745	3.945	5.788	2.590	5.124	2.145
15	Kota Solok	6.535	3.437	7.336	3.526	7.541	4.316	7.472	3.729	7.155	3.245
16	Kota Payakumbuh	13.494	5.264	13.759	5.417	14.139	7.353	14.008	5.581	13.879	5.256
17	Kota Pariaman	15.481	4.468	11.282	4.656	9.922	5.850	11.498	3.887	10.691	4.349
18	Kota Sawahlunto	6.467	2.356	6.594	2.487	7.111	3.005	6.655	2.487	6.251	2.103
19	Kab. Mentawai	11.558	2.318	12.968	2.850	13.461	1.635	13.579	1.496	12.863	1.139
SUMBAR		636.311	172.387	633.586	184.706	600.689	220.509	636.173	182.782	627.267	180.441
		808.698		818.292		821.198		818.955		807.708	

Sumber: Lampiran I

Dari tabel 4.2.1 dapat dilihat bahwa jumlah siswa Provinsi Sumatera Barat jenjang pendidikan dasar (sd – smp). Tahun 2006/2007 jumlah siswa sebanyak 808.698 dan 818.292 pada Tahun 2007/2008. Untuk tahun 2008/2009 mengalami peningkatan sebesar 821.198, dan 818.955 pada tahun 2009/2010. Selanjutnya pada Tahun 2010/2011 menurun menjadi 807.708.

Disparitas pendidikan di tingkat SD sudah relatif kecil, tetapi pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi, disparitas semakin nyata, terutama pada jenjang menengah. Ini berarti bahwa sekolah di kota lebih dituju bagi orang tua dan peserta didik ketimbang sekolah yang berada di kabupaten.

4.2.2 Masalah Mutu Pendidikan

Komponen masukan pendidikan yang secara signifikan berpengaruh terhadap peningkatan mutu pendidikan meliputi: (1) ketersediaan pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memadai baik secara kuantitas dan kualitas, maupun kesejahteraan yang belum memadai, (2) prasarana dan sarana belajar yang belum tersedia dan belum didayagunakan secara optimal, dan (3) pendanaan pendidikan yang belum memadai untuk menunjang mutu pembelajaran, (4) proses pembelajaran yang belum efisien dan efektif.

Salah satu faktor yang terpenting dalam mempengaruhi mutu pendidikan adalah ketersediaan pendidik dan tenaga kependidikan. Sampai dengan tahun 2011 di Sumatera Barat terdapat 1594 orang guru dari jenjang pendidikan dasar, baik pada sekolah negeri maupun swasta.

Dalam kaitan dengan tenaga kependidikan mengungkapkan bahwa guru dan pegawai administrasi di jenjang pendidikan dasar masih relatif kurang. Dari jumlah SD sebanyak 4477 sekolah dan Sekolah Menengah 1202 sekolah, masing – masing hanya memiliki guru olahraga, guru agama, dan pegawai administrasi, serta penjaga sekolah hanya beberapa orang setiap sekolahnya. Pada tingkat pendidikan Dasar, terlihat bahwa pendidik dan tenaga kependidikannya masih sangat kurang.

Kualifikasi pendidik ditinjau dari ijazah tertinggi menunjukkan keragaman. Untuk jenjang SD, pendidik dengan kualifikasi Sarjana (S1), masih dalam persentase yang sangat kecil. Umumnya guru SD masih berkualifikasi D3. Hal ini menunjukkan kondisi yang kurang baik dibandingkan dengan ijazah pendidik pada SMA dan SMK dengan latar belakang S1 lebih dari 85%, dalam kaitannya dengan kelayakan mengajar guru.

Kualitas dan jumlah fasilitator pendidikan non formal masih belum memenuhi harapan mulai dari pendidikan anak usia dini, pendidikan kesetaraan, pendidikan kecakapan hidup pendidikan pemberdayaan perempuan sampai pada pendidikan keagamaan. Tenaga kependidikan pada Pendidikan Non-Formal (PNF) juga masih memerlukan perbaikan. Jumlah dan kualitas fasilitator pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM) dan sanggar kegiatan belajar (SKB) masih rendah, kualitas fasilitator kursus dan bimbingan belajar belum sesuai kebutuhan belajar masyarakat, jumlah dan kualitas fasilitator pendidikan non-formal (tenaga Lapangan Diknas) tingkat nagari belum ada.

Hal lain dalam kaitannya sarana dan prasarana pendidikan adalah penggunaan dan pemanfaatan ICT. Walaupun masih dalam lingkup terbatas, pendidikan di Sumatera Barat sudah memanfaatkan ICT, terutama dalam pengelolaan dan pembelajaran. Pendidikan kejuruan telah merintis sistem pengelolaan dan materi pembelajaran untuk siswa SMK yang disesuaikan dengan kebutuhan keterampilan oleh industri.

Faktor lain yang berkaitan dengan peningkatan mutu dan daya saing adalah anggaran pendidikan yang belum memadai, baik ketersediaanya maupun dalam efisiensi dan efektivitas pengelolaannya. Hal ini dapat kita lihat pada tabel 4.2.2 mengenai alokasi APBD untuk jenjang pendidikan dasar

Tabel 4.2.2 Alokasi APBD Jenjang Pendidikan Dasar

No	Bidang/ UPT	Alokasi 2006/2007	Alokasi 2007/2008	Alokasi 2008/2009	Alokasi 2009/2010	Alokasi 2010/2011
1	SEKRETARIAT	4,675,760,800	4,878,340,800	5,465,678,500	5,875,516,878	6,374,516,932
2	SD	4,888,265,656	5,260,870,899	5,698,988,600	5,987,656,764	6,177,057,765
3	SMP	6,546,543,700	6,834,904,560	7,111,675,800	7,347,755,378	8,256,657,968
3	SMA/SMK	24,453,321,987	27,675,890,760	29,765,654,600	32,867,986,453	34,727,461,320
4	PAUD PK – PLK	1,844,074,125	2,176,843,000	2,356,786,680	2,564,876,650	4,220,661,400
5	PNFI	1,637,602,650	1,876,983,126	2,048,584,125	2,088,989,770	2,172,093,440
6	PEMUDA	2,628,448,254	2,742,244,144	2,861,148,572	3,196,878,990	3,456,923,550
7	OLAHRAGA	7,690,650,000	7,980,670,346	8,356,865,970	8,986,770,656	9,102,840,600
8	BLPT	1,402,476,000	1,637,602,650	1,948,566,286	2,198,183,970	2,404,182,000
9	BPKB	454,870,560	480,950,870	514,980,790	586,176,670	673,111,800
10	BALTEKOMDIK	509,490,321	576,566,780	626,607,890	650,879,245	726,140,975
		52,331,504,050	62,121,867,945	66,755,537,810	72,351,671,424	78,291,647,755

Sumber : Lampiran 4

Pembangunan pendidikan selama lima tahun terakhir sudah mendapat prioritas tertinggi dalam pembangunan nasional yang ditunjukkan oleh penyediaan anggaran pembangunan dengan porsi terbesar dibandingkan dengan bidang-bidang pembangunan lainnya. Komitmen Pemerintah dalam melaksanakan UUD 1945 dan UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam alokasi anggaran pendidikan dari APBN/APBD, dan penyelenggaraan pendidikan dasar tanpa memungut biaya secara bertahap mulai diwujudkan. Pemerintah dan pemerintah daerah juga belum mampu menyediakan pelayanan pendidikan dasar secara cuma – cuma. Terlihat pada tabel 4.2.2 diatas, pada tahun 2006/2007 alokasi apbd untuk sektor pendidikan tingkat sd dan smp adalah 4.888.265.656 dan 6.546.543.700, kemudian tahun 2007/2008 mengalami peningkatan sebesar 5.260.870.899 dan 6.834.904.560. Tahun 2008/2009, 2009/2010, dan 2010/2011 berturut turut mengalami peningkatan 5.465.678.500 dan 7.111.675.800 tahun 2008/2009, tahun 2009/2010 menjadi 5.987.656.764 dan 7.347.755.378, dan tahun 2010/2011 meningkat menjadi 6.177.057.765 dan 8.256.657.968.

4.2.3 Masalah Tata Kelola

Faktor yang turut berpengaruh terhadap rendahnya efisiensi dan efektivitas pendidikan adalah rendahnya kemampuan pengelolaan berbagai masukan pendidikan baik dalam menjalankan proses pembelajaran maupun dalam pengelolaan pendidikan secara keseluruhan baik pada tingkat satuan pendidikan maupun pada pengelola pendidikan yang ada diatasnya. Hal ini dilihat dari lemahnya fungsi supervisi pendidikan, baik yang dilakukan oleh tenaga

fungsional. Seperti pengawas sekolah untuk tingkat SD dan/atau pengawas bidang studi untuk tingkat SMP dan SMA/SMK, maupun supervisi oleh kepala sekolah sebagai manajer sekolah. Kelemahan pada aspek perencanaan kegiatan pembelajaran, dan evaluasi hasil belajar tidak termonitoring secara efektif oleh para supervisor, sehingga kelemahan pada proses pembelajaran tidak teridentifikasi secara akurat.

4.3 Strategi Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Pendidikan Dasar

Strategi secara sederhana dapat didefinisikan sebagai keputusan atau tindakan yang berusaha untuk mencapai sasaran organisasi. Strategi itu sendiri dipengaruhi oleh misi organisasi atau lembaga (sekolah) dan lingkungannya. Dalam hubungan ini penyusunan RAPBS untuk Pendidikan Dasar di Sumatera Barat memerlukan analisis masa lalu dan lingkungan ekstern yang mencakup kekuatan (strength), kelemahan (weakness), peluang (opportunities) dan ancaman (threats).

Anggaran pendidikan Pendidikan di Sumatera Barat sangat terpengaruh oleh berbagai perubahan, baik dalam aspek politik, sosial, budaya, ekonomi, teknologi, industri, maupun informasi. Perubahan dalam aspek aspek tersebut menuntut para pengambil keputusan kebijakan pendidikan menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut. Dengan demikian, dalam penyusunan RAPBS pendidikan dasar penting untuk diperhatikan berbagai peluang anggaran pendidikan. Strategi anggaran pendidikan dalam penyusunan RAPBS dimulai

dengan mengkaji perubahan – perubahan peraturan per undang-undangan. Tuntutan peningkatan mutu pendidikan yang mungkin membuka peluang, dalam hubungan ini pemberian kewenangan kepada Kepala Sekolah yang menjadi tanggungjawabnya menjadi sangat strategis.

Salah satu konsep strategis anggaran menurut Arnsaldo C. Hax dan Nicholas S. Majluk dalam bukunya *The Strategic Concept and Process: Pragmatic Approach*, 1991: menentukan tingkat kontribusi dari setiap input pendidikan yang bermuatan biaya atau anggaran terhadap mutu pendidikan atau prestasi belajar siswa Pendidikan Dasar (efisiensi internal) dan angka permintaan masyarakat terhadap lulusan Jenjang Pendidikan Dasar (SD dan SMP) (Efisiensi eksternal).

Lingkungan pendidikan dapat digolongkan menjadi lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Lingkungan internal jenjang Pendidikan Dasar mencakup tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, kelengkapan fasilitas, dan anggaran yang tersedia di setiap Jenjang Pendidikan Dasar yang ada di Sumatera Barat. Sedangkan lingkungan eksternal sekolah mencakup kondisi sosial ekonomi dan aspirasi masyarakat, keadaan sosial ekonomi orang tua, globalisasi informasi dan teknologi dan industri yang berkembang sangat cepat sehingga sangat berpengaruh terhadap pendidikan.

Analisa keefektifan biaya atau anggaran merupakan cara terbaik dalam menyusun RAPBS Jenjang Pendidikan Dasar yang berorientasi terhadap skala prioritas dan mutu.

Faktor – faktor eksternal pendidikan, seperti keadaan sosial ekonomi orang tua murid, aspirasi keluarga sangat berpengaruh terhadap pencapaian prestasi

siswa. Untuk mengetahui seberapa besar peran serta dari pemerintah, orang tua, dan dari yayasan atau pihak swasta, maka tabel 4.3 akan menyajikan data anggaran dari rumah tangga.

Tabel 4.3 Anggaran Pendidikan dari rumah tangga

No	Kab/ Kota	2006/2007	2007/2008	2008/2009	2009/2010	2010/2011
		SD/SMP	SD/SMP	SD/SMP	SD/SMP	SD/SMP
1	Agam	3.493.969	3.619.102	3.910.121	3.920.131	4.192.230
2	Pasaman	1.334.455	1.423.324	1.574.421	1.650.241	1.704.850
3	50 Kota	977.826	981.234	992.421	1.007.432	1.112.404
4	kab. Solok	1.085.452	982.042	990.024	1.120.135	911.131
5	Pd.Pariaman	955.064	971.141	982.314	990.144	990.141
6	Pes Selatan	716.960	798.241	792.251	960.145	940.241
7	Tanah Datar	1.494.920	1.512.353	1.624.243	1.785.058	1.935.353
8	Sijunjung	852.302	970.203	990.203	1.010.324	1.060.244
9	Mentawai	351.678	409.342	594.034	624.242	701.414
10	Solok Selatan	850.203	882.425	910.241	956.144	984.424
11	Dhamasraya	730.230	802.422	882.494	924.242	997.424
12	Pas Barat	465.024	524.422	690.234	370.232	432.233
13	Bukittinggi	980.808	983.305	1.024.220	1.110.425	1.285.903
14	Padang	2.570.073	2.670.133	2.942.046	3.128.424	3.296.114
15	Pd Panjang	880.224	950.414	972.244	993.133	1.091.033
16	Sawahlunto	401.615	492.113	526.141	574.414	581.141
17	solok	1.572.211	1.642.141	1.653.130	1.674.313	1.691.783
18	payakumbuh	1.942.442	2.141.441	2.283.930	2.940.734	2.980.224
19	pariaman	953.232	993.589	1.059.425	1.195.024	1.236.857
jumlah		22.608.688	23.749.387	25.394.137	26.934.937	28.125.144

Sumber : Lampiran 6

Untuk tahun 2007 anggaran dari rumah tangga untuk pendidikan dasar berkisar sebesar 22.608.688. Meningkat menjadi 23.749,387 pada tahun 2008. Kemudian tahun 2009 menjadi 25.394,137 dan 26.934,937 pada tahun 2010. Dan pada tahun 2011 meningkat menjadi 28.125,144.

4.4 Penyelenggaraan Pendidikan di Sumatera Barat dengan Indikator

Siswa Putus Sekolah pada Jenjang Pendidikan Dasar

Untuk melihat seberapa besar siswa Putus Sekolah Jenjang Pendidikan Dasar di Sumatera Barat, maka kita dapat lihat dari Tabel 4.4 berikut ini:

Tabel 4.4.1 Jumlah Siswa Putus Sekolah Sumatera Barat

N O	Kab/ Kota	2006/2007		2007/2008		2008/2009		2009/2010		2010/2011	
		SD	SMP	SD	SM P	SD	SM P	SD	SM P	SD	SM P
1	Agam	128	23	340	20	118	20	111	15	105	13
2	Pasaman	180	22	178	20	175	16	170	14	162	11
3	50 Kota	229	28	223	25	220	19	210	15	209	13
4	Kab Solok	150	29	139	18	126	5	119	2	116	1
5	pdg. Pariamn	160	39	145	23	135	18	127	14	121	12
6	Kab Pessel	91	60	82	42	76	36	60	15	54	12
7	Tanah Datar	146	54	134	45	121	36	110	20	101	16
8	Kab. Saw. Sjnlg	76	68	65	56	57	47	48	38	45	30
9	Kab. Solisel	60	38	46	26	35	15	15	5	10	2
10	Dharmasraya	92	68	88	54	76	46	55	32	48	20
11	Kab. Pas. Barat	370	84	334	57	298	33	279	28	220	16
12	Kota Bukittinggi	38	22	30	18	24	15	16	6	8	1
13	Kota Padang	98	46	85	27	72	20	54	17	29	14
14	Kota Pdg. Pjg	42	19	34	13	26	8	19	4	9	1
15	Kota Solok	26	26	23	19	13	13	5	8	3	3
16	Payakumbuh	45	34	38	26	34	25	25	19	19	13
17	Kota Pariaman	26	24	24	16	15	8	9	4	3	2
18	Sawahlunto	39	23	32	14	26	10	17	7	3	3
19	Kab. Mentawai	60	38	49	19	42	7	26	3	11	1
SUMBAR		2056	745	2089	538	1689	397	1475	266	1276	184
		2801		2627		2086		1741		1460	

Sumber: Lampiran 2

Untuk Tahun 2006/2007, jumlah Siswa Jenjang Pendidikan Dasar baik itu SD maupun SMP berjumlah 2801 orang, tahun 2007/2008 berkisar antara 2627 orang. Pada Tahun 2008/2009 mengalami sedikit penurunan menjadi 2086 orang. Kemudian pada Tahun 2009/2010 sebesar 1741 orang. Dan pada Tahun 2010/2011 kembali turun menjadi 1460 orang.

Dapat kita perbandingan antara jumlah siswa putus sekolah dengan jumlah siswa Provinsi Sumatera Barat jenjang Pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama, dapat kita lihat pada Tabel 2 berikut ini.

Tabel 4.4.2. Rasio Jumlah Siswa Putus Sekolah dengan Jumlah Siswa Jenjang Pendidikan Dasar Provinsi Sumatera Barat

N O	Kab/ Kota	2006/2007		2007/2008		2008/2009		2009/2010		2010/2011	
		SD	SMP	SD	SMP	SD	SMP	SD	SMP	SD	SMP
1	Agam	0,002	0,002	0,006	0,001	0,002	0,001	0,002	0,001	0,002	0,001
2	Pasaman	0,005	0,003	0,005	0,002	0,004	0,001	0,004	0,001	0,004	0,001
3	50 Kota	0,005	0,003	0,005	0,002	0,005	0,001	0,004	0,001	0,004	0,001
4	Kab Solok	0,003	0,002	0,003	0,001	0,003	0,000	0,003	0,000	0,003	0,000
5	pdg. Pariamn	0,003	0,002	0,002	0,001	0,002	0,001	0,002	0,001	0,002	0,001
6	Kab Pessel	0,001	0,003	0,001	0,002	0,001	0,002	0,001	0,001	0,001	0,001
7	Tanah Datar	0,003	0,005	0,003	0,004	0,004	0,003	0,003	0,002	0,002	0,001
8	Kab. Saw. Sjnig	0,003	0,010	0,002	0,007	0,002	0,006	0,002	0,005	0,002	0,004
9	Kab. Solsei	0,004	0,009	0,004	0,005	0,004	0,003	0,001	0,001	0,001	0,000
10	Dharmasraya	0,004	0,011	0,004	0,008	0,003	0,005	0,002	0,005	0,002	0,003
11	Kab. Pas. Barat	0,007	0,008	0,006	0,005	0,006	0,002	0,005	0,002	0,004	0,001
12	Kota Bukittinggi	0,003	0,004	0,002	0,003	0,002	0,002	0,001	0,001	0,001	0,000
13	Kota Padang	0,001	0,002	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,000	0,001
14	Kota Pdg. Pjg	0,007	0,009	0,006	0,006	0,004	0,002	0,003	0,002	0,002	0,000
15	Kota Solok	0,004	0,008	0,003	0,005	0,002	0,003	0,001	0,002	0,000	0,001
16	Payakumbuh	0,003	0,006	0,003	0,005	0,002	0,003	0,002	0,003	0,001	0,002
17	Kota Pariaman	0,002	0,005	0,002	0,003	0,002	0,001	0,001	0,001	0,000	0,000
18	Kota Sawahlunto	0,006	0,010	0,005	0,006	0,004	0,003	0,003	0,003	0,000	0,001
19	Kab. Mentawai	0,005	0,016	0,004	0,007	0,003	0,004	0,002	0,002	0,001	0,001
SUMBAR		0,07	0,004	0,07	0,08	0,06	0,05	0,04	0,03	0,03	0,02
		0,08		0,14		0,10		0,08		0,05	

Sumber : Lampiran 3

Pada tahun 2006/2007 sebesar 8%, mengalami kenaikan pada tahun 2007/2008 sebesar 14%. Hal ini berarti jumlah siswa putus sekolah meningkat sebesar 6% dari tahun 2006/2007 menuju 2007/2008. Selanjutnya Tahun 2008/2009 rasio jumlah siswa putus sekolah dengan jumlah siswa jenjang pendidikan dasar kembali turun sebesar 4% menjadi 10%. Pada tahun berikutnya kembali 8% dan 5%, baik itu tahun 2009/2010 dan tahun 2010/2011.

BAB V

HASIL PEMBAHASAN dan PENEMUAN EMPIRIS

5.1 Pengujian Empiris

Penaksiran terhadap faktor – faktor yang mempengaruhi Efektivitas Alokasi Anggaran Pendidikan Dasar di Sumatera Barat dengan mengambil Jumlah Siswa Putus Sekolah sebagai variabel dependent dinalisis dengan analisa regresi berganda, dengan metode Ordinary Least Square (OLS) pada SPSS 17.0 windows.

Tujuan pengujian empiris ini adalah untuk melihat dan menganalisa seberapa besar pengaruh dari variabel bebas yang dimasukkan kedalam model terhadap Jumlah Siswa Putus Sekolah sebagai variabel terikat, selain itu juga untuk menguji apakah variabel bebas tersebut signifikan pengaruhnya terhadap variabel terikat. Kemudian untuk pembahasan selanjutnya penulis memasukkan variabel – variabel bebas ke dalam model sebagai berikut :

Alokasi APBD untuk sektor pendidikan (X_1), Jumlah BOS (X_2), Jumlah Anggaran Rumah Tangga (X_3)

Dari hasil perhitungan diperoleh hasil persamaan sebagai berikut :

$$Y = 5,295E9 - 47,1130 X_1 - 5,128E8 X_2 - 4,154E9 X_3 \\ (-2,927) \quad (-3,046) \quad (-2,969)$$

$$\text{Adjusted R square} = 0,905$$

$$F_{\text{test}} = 21,744$$

5.1.1. Penemuan Empiris

Dari hasil regresi diatas terlihat bahwa konstanta sebesar 5,295E9 artinya Jumlah Siswa Putus Sekolah sebesar 5,295E9 pada saat variabel alokasi APBD sektor pendidikan, jumlah BOS, jumlah anggaran rumah tangga tidak berubah. Koefisien adjusted R square dari struktur tersebut sebesar 0,905 menunjukkan bahwa variabel bebas dari persamaan tersebut cukup dapat menerangkan variabel terikat atau dapat dinyatakan bahwa besarnya alokasi APBD sektor pendidikan, jumlah BOS ,dan jumlah anggaran rumah tangga terhadap jumlah siswa putus sekolah adalah sebesar 90%, dan sisanya disebabkan oleh faktor lain yang dikesampingkan, ini juga dapat berarti bahwa pengaruh variabel independen signifikan terhadap jumlah siswa putus sekolah pada jenjang pendidikan dasar (SD – SMP) di Provinsi Sumatera Barat.

5.1.2 Uji Hipotesa

1. T-test

Nilai T-test yang diperoleh dari variabel alokasi APBD sektor pendidikan (2,927), jumlah BOS (-3,046), dan jumlah anggaran Rumah Tangga (-2,969) masing – masing memperlihatkan hubungan yang signifikan karena T-tabel pada derajat kepercayaan 95% adalah sebesar (2,920). Berarti T-testnya lebih besar dari T-tabelnya.

2. F-test

Nilai F-test yang diperoleh sebesar 21,744 menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang nyata signifikan dari variabel independen secara bersama – sama, karena nilai F-testnya besar dari nilai F-tabelnya yang hanya sebesar (19,00) pada derajat kepercayaan 95%.

5.1.3. Analisis Data

Koefisien regresi sebesar 47,1130 dapat diartikan bahwa untuk setiap kenaikan alokasi APBD untuk sektor pendidikan sebesar satu unit akan mengakibatkan menurunnya angka putus sekolah jenjang pendidikan dasar sebesar 47,1130 unit, dengan asumsi ceteris paribus. Dengan demikian alam analisa studi ini dapat ditafsirkan bahwa alokasi anggaran APBD memiliki korelasi negatif terhadap jumlah siswa putus sekolah. Dalam artian hipotesis diterima dengan tingkat keberartian didukung oleh nilai T-test yaitu 2,927 yang lebih besar dari nilai T-tabel yaitu sebesar 2,920, signifikan pada derajat kepercayaan 95%.

Selanjutnya dapat dijelaskan disini bahwa walaupun faktor alokasi APBD untuk sektor pendidikan merupakan faktor penting dalam mempengaruhi jumlah siswa putus sekolah, namun kecendrungan beberapa faktor lain juga ikut mempengaruhi jumlah siswa putus sekolah tersebut. Untuk variabel alokasi APBD untuk sektor pendidikan ini dapat disimpulkan bahwa semakin besar alokasi APBD untuk sektor pendidikan maka akan menurunkan jumlah siswa yang putus sekolah terutama pada jenjang pendidikan dasar di Sumatera Barat.

Selanjutnya untuk melihat koefisien regresi Anggaran Beasiswa BOS sebesar $-5,128E8$ yang dapat diartikan bahwa untuk setiap kenaikan Anggaran Beasiswa BOS satu unit, maka akan menurunkan jumlah siswa putus sekolah sebesar $5,128E8$ unit. Dengan demikian dalam analisa studi ini dapat ditafsirkan bahwa jumlah BOS memiliki korelasi negatif terhadap jumlah siswa putus sekolah. Dalam artian bahwa hipotesis diterima dengan tingkat keberartian didukung oleh nilai T-test yaitu 3,046 yang lebih besar dari nilai T-tabel yaitu sebesar 2,920, signifikan pada derajat kepercayaan 95%.

Untuk melihat koefisien regresi jumlah anggaran Rumah Tangga sebesar $-4,154E9$, dapat diartikan bahwa untuk setiap kenaikan anggaran rumah tangga sebesar satu unit, maka akan menurunkan jumlah siswa putus sekolah sebesar $4,154E9$, diasumsikan ceteris paribus. Dari pengujian tersebut dapat kita lihat bahwa hasilnya cocok dengan hipotesis yang telah dikemukakan sebelumnya. Pengertian cocok disini adalah jika anggaran rumah tangga besar maka kemungkinan akan mempengaruhi penurunan jumlah siswa putus sekolah. Yang juga didukung oleh keberartian yang signifikan terlihat dari nilai T-test 2,969 lebih besar dari nilai T-tabel pada derajat kepercayaan 95%.

5.2. Implikasi dan Kebijakan

5.2.1 Efisiensi Pembiayaan Pendidikan

Masalah pendidikan tidak lepas dari kebijaksanaan dari pemerintah karena pendidikan merupakan suatu upaya peningkatan sumber daya manusia yang

berusaha merubah pola pikir masyarakat dengan membentuk suatu sistem pendidikan nasional.

Namun didalam penyelenggaraan pendidikan tersebut pemerintah dihadapi oleh berbagai kendala salah satunya pembiayaan, apakah akan tercapainya efisiensi dan efektivitas terhadap pembiayaan tersebut.

Berdasarkan data yang telah dinyatakan sebelumnya, maka kebijaksanaan yang dapat diambil adalah dengan penefektifkan dari pembiayaan untuk sektor pendidikan, dengan penggunaan dana yang sesuai dengan keputusan dan skala prioritas.

5.2.2 Pengaruh pembiayaan terhadap efektivitas

Berdasarkan hasil pengujian empiris melalui metoda regresi ditemukan bahwa yang terdapatnya hubungan yang negatif antara pembiayaan (Anggaran) terhadap efektivitas yang direfleksikan melalui jumlah siswa putus sekolah yang ditunjukkan oleh koefisien determinasi (R^2) dan uji F-test yang diperoleh menguatkan hipotesa sebelumnya bahwa pembiayaan akan mempengaruhi efisiensi dengan tingkat signifikan yang baik pula.

Sumatera Barat dapat melakukan kebijaksanaan dengan penambahan beasiswa bagi mereka yang gagal dalam melanjutkan pendidikan terkendala masalah biaya. Peningkatan beasiswa dapat dilakukan dengan pengalokasian dana lebih terarah dan terokus terhadap pembiayaan terhadap uang SPP, buku – buku, dan seragam sekolah yang berkualitas.

Tentu saja tidak hanya variabel pembiayaan saja yang mempengaruhi efektivitas pendidikan tetapi juga dipengaruhi oleh tenaga didik, individu, dan rumah tangga yang ikut dalam pendidikan itu sendiri, dimana pemerintah sebagai produsen pendidikan tentu dibatasi oleh kemampuan, salah satunya terbatasnya anggaran untuk sektor pendidikan tersebut.



BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Dari uraian yang telah dijelaskan pada bab – bab terdahulu maka disini penulis berkesimpulan bahwa:

1. Pembiayaan penyelenggaraan pendidikan dasar oleh pemerintah dari tahun 2006/2007 sampai dengan 2010/2011 selalu mengalami peningkatan pembiayaan. Ini berdampak terhadap peningkatan pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan terutama pada jenjang pendidikan dasar. Kondisi ini diharapkan tercapainya efektivitas dan efisiensi pembiayaan penyelenggaraan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar. Pada sisi rumah tangga sendiri juga mengalami peningkatan, bertujuan untuk meminimalisir jumlah siswa putus sekolah yang ada di Sumatera Barat.
2. Untuk melihat seberapa besar efektivitas anggaran pendidikan di Sumatera Barat, dapat penulis uraikan sebagai berikut:
 - Alokasi APBD untuk sektor pendidikan yang berasal dari pemerintah mempunyai korelasi negatif terhadap jumlah siswa putus sekolah pada jenjang pendidikan dasar di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat, artinya disini bahwa jika terjadi kenaikan alokasi anggaran pendidikan dari APBD maka akan menurunkan jumlah siswa putus sekolah pada jenjang pendidikan dasar di Sumatera Barat khususnya untuk tahun tahun berikutnya.

- Alokasi Anggaran Beasiswa BOS mempunyai korelasi negatif dengan jumlah siswa putus sekolah. Ini berarti seiring dengan naiknya anggaran untuk Beasiswa Bos pada jenjang pendidikan dasar akan menurunkan jumlah siswa putus sekolah sebesar kenaikan biaya Bos tersebut.
 - Pada sisi anggaran Rumah Tangga sendiri, juga mempunyai korelasi negatif dengan jumlah siswa putus sekolah. Pada sisi ini rumah tangga berperan penting sebagai motivator untuk menunjang penurunan jumlah siswa yang mengalami putus sekolah pada jenjang pendidikan Sumatera Barat.
3. Pemerintah hanya berperan kecil dalam pembiayaan pendidikan. Hampir 70 - 80 % pembiayaan pendidikan ditanggung oleh rumah tangga. Ini memperlihatkan bahwa pemerintah belum maksimal dalam pelayanan pendidikan. Dilihat dari alokasi dana pemerintah, terlihat semakin tinggi jenjang pendidikan semakin kecil kontribusi pemerintah dalam pembiayaan pendidikan. Sebagian subsidi pemerintah diserap untuk anggaran rutin terutama pembayaran gaji (93 %) sedangkan sisanya untuk biaya pembangunan. Sedangkan biaya yang ditanggung oleh rumah tangga sebagian besar diserap oleh biaya tidak langsung (*inderict cost*) pendidikan terutama biaya transportasi dan uang saku siswa.
4. Angka partisipasi sekolah di Indonesia masih rendah terutama pada level pendidikan menengah yang hanya berkisar 55,7 % untuk SMP dan 32,3 % untuk SMA sedangkan untuk SD sudah mencapai 94,5 %. Masih ada sekitar

16.337.204 atau 31,2 % anak usia 7-18 tahun yang tidak mendapatkan akses pendidikan.

5. Beban biaya pendidikan sebagian besar ditanggung oleh rumah tangga sehingga banyak bagian masyarakat yang belum mampu mengakses pendidikan terutama masyarakat miskin. Masalah lain adalah kecilnya alokasi anggaran pendidikan dan banyak yang tidak tepat sasaran. Alokasi masih terkonsentrasi pada level pusat bukan pada level sekolah dan desentralisasi belum menunjukkan perubahan yang signifikan dalam kebijakan anggaran. Sistem inilah yang harus diperbaiki untuk menuju MDGs 2015 sehingga wajib belajar dua belas tahun dapat dilaksanakan di Indonesia dan Provinsi Sumatera Barat khususnya.

6.2 Saran

Dari analisa sebelumnya, hal – hal yang perlu diperhatikan dalam pembiayaan penyelenggaraan pendidikan dasar tercapai kondisi efektif sebagai berikut:

1. Dengan pengefektifan pengalokasian penggunaan dana pada masing – masing input pendidikan dasar.
2. Sumatera Barat dalam alokasi APBD lebih memfokuskan terhadap bahan bacaan dan uang penyelenggaraan pendidikan bagi siswa yang kurang mampu, sehingga sangat mempengaruhi penurunan jumlah siswa yang putus sekolah jenjang pendidikan dasar pada tahun – tahun berikutnya.
3. Menyelenggarakan pendidikan dasar yang berkualitas dan kompetitif , seperti yang tertuang dalam RPJM Provinsi Sumatera Barat antara lain :

- Menghapus/mengurangi hambatan biaya (cost barrier) melalui pemberian beasiswa, dan intensitas Program PKPS BBM Bidang Pendidikan, khususnya penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) guna penghapusan biaya-biaya pendidikan yang dipungut oleh sekolah bagi anak-anak dari keluarga miskin / kurang mampu.
 - Guna mengatasi kelebihan daya tampung SD di Sumatera Barat, dengan kondisi rata-rata siswa per kelas 23 orang, menjadi 36 orang per kelas pada tahun 2010, perlu diprogramkan TK-SD dan SD-SMP satu atap guna mengatasi kekurangan lahan pembangunan USB TK maupun SMP, dengan memanfaatkan sejumlah ruang kelas SD yang mengalami kekurangan siswa.
4. Untuk mencapai Angka Partisipasi Murni (APM) satuan pendidikan SMP/MTs sebesar 80 % pada tahun 2012, kondisi sekarang 69.02 %, perlu penambahan USB dan RKB SMP, khususnya pada daerah kabupaten dengan APM dibawah rata-rata Sumatera Barat. Mengingat besarnya anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunann USB dan RKB SMP ini, maka masalah pendanaan diatasi melalui sharing dana antara Pemerintah Pusat, Propinsi dan Kab/Kota.
5. Pada tahun 2012 diharapkan angka putus sekolah SD, SMP dan Sekolah dapat ditekan sampai 0 %, dan angka melanjutkan pada setiap jenjang pendidikan mencapai 100 %, maka intensitas pemberian beasiswa bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu terus ditingkatkan.

6. Sebuah tantangan bagi dunia pendidikan di Indonesia dalam melihat dimensi MDGs 2015 karena secara struktural Indonesia masih jauh dari MDGs 2015. Agenda utama yang harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah membenahi program wajib belajar sembilan tahun dan secara bertahap melaksanakan program wajib belajar dua belas tahun untuk menuju MDGs 2015. Target yang ingin dicapai adalah tersedianya akses pendidikan bagi seluruh anak usia 7-15 tahun pada tahun 2010 dan anak usia 7-18 tahun pada tahun 2015. Program ini akan memerlukan anggaran yang besar dan pola alokasi yang efisien.



DAFTAR PUSTAKA

- Alisyahbana, Armida S, 2005, *Otonomi Daerah dan Desentralisasi Pendidikan*, Artikel. [Online]. Tersedia : http://www.geocities.com.arief_anshory/otda_pendidikan.pdf [20 September 2011].
- Badan Pusat Statistik, 2008, Sumatera Barat.
- Center for the Study Living Standards, 2001, *Discussion Paper on Health and Education Human Capital Indicators*, Center for the Study Living Standards.
- Depdiknas, 2001, *Pengembangan Manajemen Sekolah*, Jakarta, Penerbit Depdiknas.
- Dinas Pendidikan, 2009, *Pembiayaan Pendidikan Sumatera Barat*, Sumatera Barat, Dinas Pendidikan.
- Education Statistic Bulletin, 1999, *The Return on Investment in Education*, Education Staistics Bulletin No. 8, Quebec.
- Elfindri, dkk, 2004, *Pendanaan Pendidikan di Indonesia*, Jakarta, Depdiknas.
- Fattah, Nanang, 1998, *Studi tentang Pembiayaan Pendidikan Sekolah Dasar*, Bandung, PT. Remaja Rosda Karya.
- _____, 2004, *Konsep Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dan Dewan Sekolah*. Bandung, CV. Pustaka Bani Quraisy.
- _____, 2006, *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*, Bandung, PT Remaja Rosda Karya, Cetakan keempat.
- Fischel, William A. (2008). "*Educational Finance*" dalam The New Palgrave Dictionary of Economics, 2nd Edition.

Syam, 2008, *Interaksi antar Partisipasi Anggaran dan Penggunaan Anggaran sebagai Alat Ukur Kinerja dengan Orientasi Manjerial*, Simposium Nasional Akuntansi IX.

Syamsudin, 2009, *Analisis mengenai Anggaran Pendidikan terhadap Mutu Hasil Belajar*, Medan, Universitas Sumatera Utara.

Toyamah, Nina, *Alokasi Anggaran Pendidikan Era Otonomi Daerah*, Jakarta, Lembaga Penelitian Smeru.

UU RI No. 20, 2003, *SISDIKNAS Bagian Keempat*.

UU Otonomi Daerah 1999, Sinar Grafika, Jakarta

UU Otonomi Daerah 2004, Bandung

Walter, McMahon, Terry G. Geske, 1982, *Financing Education: Overcoming Inefficiency and Inequity*, USA, University of Illionis.

Widjaja, H.A.W, 2001, *Otonom daerah dan Daerah Otonom*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada